

Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism

Volume 1 Issue 1 (January-June 2022), pp. 33-118

ISSN XXXX-XXXX (Print) XXXX-XXXX (Online)

<https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56878>

Published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia and managed by Pancasila dan Constitution Studies Center, Universitas Negeri Semarang, INDONESIA

Available online since January 31, 2022

Intolerance in the Flow of Information in the Era of Globalization: How to Approach the Moral Values of Pancasila and the Constitution?

Tsania Rahma*

Center for Pancasila and Constitution Universitas Negeri Semarang,

Yehezkiel Lemuel

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Debby Fitriana

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Tiara Rizki Annesha Fanani

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Rosa De Lima Gita Sekarjati

Universitas Negeri Semarang, Indonesia



ABSTRACT: Indonesia is a multicultural country that has a variety of cultures. This is due to the geographical location of Indonesia which is an archipelagic country that stretches from the western end of Sabang Island to the eastern end of Merauke Island. So, in conditions like this, various tribes, customs, ethnic cultures and beliefs emerged in Indonesia. This diversity has both positive and negative impacts. The positive impact is that diversity can strengthen unity, but the negative impact is that it can lead to

* Corresponding author's email: tsaniarahma92@gmail.com

Submitted: 27/10/2021 Reviewed: 30/10/2021 Revised: 09/12/2021 Accepted: 07/01/2022

division. One of the problems that can lead to the division of the Indonesian nation is the intolerant behavior of the people. Intolerant behavior often occurs in people's lives in various fields. The fields of politics, economics, religion, social and culture are always inseparable from intolerant attitudes, especially in the development of the flow of information in the current era of globalization. There are many cases that trigger inter-ethnic divisions that circulate in the mass media, especially social media. Therefore, a guide for the Indonesian people is needed to deal with the issue of division, namely Pancasila. Pancasila which is the nation's ideology has values that become the view of life of the Indonesian people which are always relevant to the times, especially in the current era of globalization. By implementing and preserving Pancasila in all areas of people's lives, it means that we are trying to realize a common life that is conditional on the values of unity, kinship, justice, tolerance and humanity.

KEYWORDS: Pancasila, Intolerance, Moral Values, Globalization

HOW TO CITE:

Rahma, Tsania, Yehezkiel Lemuel, Debby Fitriana, Tiara Rizki Annesha Fanani, and Rosa De Lima Gita Sekarjati. "Intolerance in the Flow of Information in the Era of Globalization: How to Approach the Moral Values of Pancasila and the Constitution?" *Indonesian Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism* 1, No. 1 (2022): 33-118. <https://doi.org/10.15294/ijpgc.v1i1.56878>



Copyright © 2022 by Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan (*Arcipelagic state*) terbesar di dunia, memiliki 17.508 pulau besar dan kecil. Letaknya diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi inilah yang membuat Indonesia menjadi negara multikultural yang memiliki beragam suku, adat, budaya, etnis dan ras. Hingga tahun 2016,

tercatat sekitar 1.340 jenis suku yang ada di Indonesia. Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. “Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen “aneka ragam”.¹

Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multi etnis, multi kultur, dan multi agama yang kesemuanya merupakan potensi untuk membangun negara multikultur yang besar “*multikultural nationstate*”. Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun (2007: 33) bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.²

Perbedaan etnis seringkali menjadi akar konflik, misalnya perbedaan antara suku Dayak dan suku Madura, biasanya konflik terjadi karena adanya perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai, atau kebutuhan. Misalnya suku Madura memiliki perilaku yang langsung merespons dengan amarah dan cenderung melalui kekerasan, hal ini menimbulkan konflik dengan suku lain. Konflik antara suku Dayak

¹ Gina Lestari, "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, No. 1 (2015).

² *Ibid.*

dan suku Madura pernah menjadi kerusuhan yang berskala besar, di mana perbedaan budaya jelas menjadi alasan perang antar-ke dua suku ini. Salah satu peristiwa yang kembali ramai diperbincangkan akhir-akhir ini adalah sentimen terhadap etnis Cina. Berbagai berita, baik itu fakta maupun bohong (*hoax*) dengan mudah dapat ditemui di media sosial. Peristiwa yang terbaru adalah sentimen etnis Cina dalam pemilukada DKI Jakarta.³

Masalah multikulturalisme ini perlu dikaji secara tuntas, agar masyarakat Indonesia tidak terbuai dan hanyut dalam slogan, seolah-olah keanekaragaman itu lebih merupakan berkah dan bukan pekerjaan rumah. Hal ini harus dipahami oleh segenap masyarakat Indonesia. Dalam kerangka inilah letak relevansi multikulturalisme untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Konsep multikulturalisme bukanlah kosa kata baru bagi sejarah Indonesia. Substansi multikulturalisme lekat kaitannya dengan lahirnya NKRI. Multikulturalisme didefinisikan secara umum oleh banyak kalangan sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain.

Multikulturalisme merupakan ideologi yang lahir dari keragaman struktur budaya dalam masyarakat yang membentuk suatu masyarakat yang multikultur. Kehidupan masyarakat multikultural rentan adanya konflik sosial. Oleh karena itu, terbentuklah multikulturalisme sebagai acuan utama terwujudnya kedamaian di tengah keragaman, yang mengakui dan mengagungkan perbedaan

³ Mohammad Mulyadi, "Membangun NKRI dengan multikulturalisme." *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* 9, No. 10 (2017): 9-12.

dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.⁴

Multikulturalisme merupakan paradigma yang baik dalam upaya merajut kembali hubungan antarmanusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh konfliktual. Secara sederhana, multikulturalisme dapat dipahami sebagai suatu konsep keanekaragaman budaya dan kompleksitas dalam masyarakat. Melalui multikulturalisme masyarakat diajak untuk menjunjung tinggi toleransi, kerukunan, dan perdamaian bukan konflik atau kekerasan dalam arus perubahan sosial. Meskipun berada dalam perbedaan, paradigma multikulturalisme diharapkan menjadi solusi konflik sosial yang terjadi selama ini. Dengan demikian, inti multikulturalisme adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnis, *gender*, bahasa, ataupun agama. Sedangkan fokus multikulturalisme terletak pada pemahaman akan hidup penuh dengan perbedaan sosial budaya, baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini individu dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya.

Namun, multikulturalisme terkadang membawa berbagai persoalan dan potensi konflik yang berujung pada perpecahan. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya, tidak mudah mempersatukan suatu keragaman tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat multikultural. Terlebih kondisi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling majemuk di dunia, selain Amerika Serikat dan India. Sejalan dengan hal tersebut, Geertz mengemukakan bahwa Indonesia ini sedemikian kompleksnya, sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis. Negeri ini

⁴ *Ibid.*

bukan hanya multi-etnis (Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya), melainkan juga menjadi arena pengaruh multimental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hindhuisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya).⁵

Semangat multikulturalisme adalah mencoba menggugat pertanyaan pokok tentang bagaimana kelompok-kelompok etnik dan budaya itu semestinya memosisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama dalam sebuah masyarakat nasional yang dikelilingi oleh nilai-nilai universal, seperti: demokrasi, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Lebih jelasnya adalah, bagaimana misalnya kelompok-kelompok etnik Bugis, Makassar, Batak, Minang, Betawi, Sunda, Jawa, China, Bali, Ambon, Manado, Papua atau yang beragama Islam, Hindu, Khong Hu Cu, Buddha, Kristen, Katolik, itu semuanya mampu hidup berdampingan dalam sebuah proses sosial yang di satu pihak memberi tempat bagi terpeliharanya identitas lokal dan kepercayaan partikularnya masing-masing, dan di pihak lain memberi kesempatan bagi sebuah proses terjadinya integrasi sosial.⁶

Ide multikulturalisme menurut Taylor merupakan suatu gagasan untuk mengatur keberagaman dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akan keberagaman itu sendiri (*politics of recognition*). Gagasan ini menyangkut pengaturan hubungan sosial atau relasi antara kelompok etnis. Sedangkan Suparlan mengungkapkan bahwa multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.⁷

⁵ Gina Lestari, 2015

⁶ Eko Digdoyo, "Kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab sosial media." *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 3, No. 1 (2018): 42-59.

⁷ *Ibid*

Negara yang memiliki keunikan multientis dan multimental seperti Indonesia dihadapkan pada dilematisme tersendiri, di satu sisi membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar sebagai *multicultural nation-state*, tetapi di sisi lain merupakan suatu ancaman. Maka bukan hal yang berlebihan bila ada ungkapan bahwa kondisi multikultural diibaratkan seperti bara dalam sekam yang mudah tersulut dan memanas sewaktu-waktu. Kondisi ini merupakan suatu kewajaran sejauh perbedaan disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Namun, ketika perbedaan tersebut mengemuka dan menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup, hal ini dapat menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan sikap yang penuh toleransi.

Dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia, pluralitas telah melahirkan kolaborasi yang indah dalam berbagai bentuk muzaid budaya yang kental dengan kemajemukan. Artinya berbagai suku, agama, ras adat-istiadat, budaya dan golongan dapat hidup berdampingan dan memiliki ruang negosiasi yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal dengan toleransi. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa keindahan masyarakat negeri katulistiwa seperti Indonesia menjadi kesaksian bagi dunia internasional. Akan tetapi, dunia pun “terhentakkan dengan tercabik-cabiknya” keindahan oleh sikap eksklusif yang tumbuh dari akar primordialisme sempit kesukuan, agama, ras, dan golongan tertentu dalam bentuk konflik. Berbagai konflik yang dilatarbelakangi oleh agama, etnis, bahasa, ekonomi, dan politik tidak bisa dihindari.

Konflik bernuansa SARA akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kebanyakan kasus yang terjadi dipicu oleh tindakan seorang atau kelompok tertentu yang intoleran yang

kemudian dibawa pada kelompoknya yang lebih luas dengan mengatasnamakan latar belakang ras, suku, agama, dan budaya. Haris mengatakan bahwa “akibat lebih jauh terjadinya konflik horizontal yang dipicu oleh kecemburuan sosial, ego daerah, ego suku, ego agama, dan lainnya. Kesadaran untuk hidup bersama secara damai sesuai makna *Bhinneka Tunggal Ika* mulai luntur”. Akibat ego seorang atau segelintir orang kemudian dibawa menjadi ego dan golongan tertentu muncul konflik besar yang membawa bencana bagi semua pihak termasuk pihak yang tidak terlibat.

Konflik sosial yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, baik dalam eskalasi besar maupun kecil telah membawa korban jiwa, harta, sumber mata pencaharian dan lainnya, sehingga menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan kebangsaan Indonesia. Nampaknya kerusuhan sosial telah menjadi gejala yang umum bagi perjalanan hidup bangsa. Dari tahun 1996 tercatat terjadi beberapa kali peristiwa/konflik yang bernuansa sosial agama, seperti kerusuhan di Tasikmalaya 26 Desember 1996, di Karawang tahun 1997 dan Tragedi Mei pada tanggal 13, 15, 17 Mei 1998, yang terjadi di Jakarta, Solo, Surabaya, Palembang, Medan, Ambon, Maluku, Nusa Tenggara, Jawa Timur (Situbondo), Jawa Tengah (Temanggung), Yogyakarta, Jawa Barat (Cirebon, Indramayu), Banten, dan di DKI Jakarta serta peristiwa-peristiwa kerusuhan lainnya.

Meskipun akhir-akhir ini tidak diketemukan konflik sosial secara fisik, namun konflik melalui media terutama media sosial, isu keragaman dalam beragama sering menjadi obyek saling fitnah melalui berita bohong (*hoax*) dengan menggunakan kendaraan politik pada saat menjelang pelaksanaan pemilu maupun pilkada.⁸

⁸ Mohammad Mulyadi, 2017.

Beberapa rentetan terjadinya kerusuhan di Indonesia yang lebih condong bernuansa sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan. Termasuk studi kasus intoleransi terjadi di Ibu Kota ketika sedang menghadapi Pilkada. Konflik intoleransi telah mengkristal dengan menggunakan dalih agama, budaya, politik, etnis, dan media sebagai alat pemicu. Secara sosiologis, konflik sosial memang lumrah terjadi, untuk itu diperlukan teori dan metode manajemen konflik dalam rangka menuju rekonsiliasi dan kesepakatan membuat komitmen perubahan (ke arah yang positif).⁹

Namun demikian persoalan mayoritas dan minoritas dapat menjadi sumber konflik, sedangkan stabilitas nasional menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional (Ishamudin, 1996:24). Konflik sosial sebagaimana dimaksud mestinya harus segera dapat diatasi atau diselesaikan agar tidak terjadi berkepanjangan, sehingga tidak menimbulkan dampak atau kurban yang lebih banyak baik fisik maupun materi. Atas dasar itulah diperlukan sistem atau strategi penyelesaian konflik sosial-keagamaan.¹⁰

Media dalam hal ini dipandang sangat tepat untuk dijadikan salah satu pertimbangan dalam meredam konflik atau praktek intoleransi. Alasan mendasar, saat ini media massa baik cetak, elektronik, dan media sosial menjadi salah satu kekuatan utama dalam mempengaruhi pandangan-pandangan individu dan masyarakat dalam mengimplementasikan nilai kebebasan beragama.¹¹

Wacana media massa seringkali menawarkan kerangka makna alternatif kepada khalayak untuk mendefinisikan diri sendiri, orang

⁹ *Ibid.*, hlm 10.

¹⁰ *Ibid.*, hlm 10.

¹¹ Natal Kristiono, "Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang." *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN* 2, No. 2 (2017): 193-204.

lain, lingkungan sosial, peristiwa-peristiwa, dan objek-objek di masyarakat.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hasil kesepakatan bapak pendiri bangsa ketika negara Indonesia didirikan, dan hingga sekarang di era globalisasi, negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi berbagai tantangan global dunia yang terus berkembang.¹²

Di era globalisasi ini peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena dengan adanya globalisasi batasan-batasan diantara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia, jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia, sedangkan hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia.¹³

Sehubungan hal tersebut, generasi muda sebagai pilar bangsa diharapkan memiliki jiwa patriotisme, nasionalisme dan nilai-nilai toleransi dengan tetap bertahan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia meskipun banyak budaya asing masuk di negara Indonesia melalui arus globalisasi sekarang ini serta tetap menghargai perbedaan satu sama lain baik perbedaan ras, agama, etnis maupun budaya. Dengan berlandaskan Pancasila diharapkan

¹² *Ibid*, hlm 25.

¹³ *Ibid*, hlm 26.

pengaruh budaya asing bisa disaring sehingga generasi muda bisa menjadi generasi yang benar-benar cinta pada tanah air Indonesia apapun keadaannya.¹⁴

Terkait dengan hal itu, makalah ini akan membahas peranan Pancasila dalam menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia di era globalisasi dalam segala bidang, baikbidang agama, ekonomi, budaya, politik maupun bidang sosial. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang tercermin akibat pudarnya rasa toleransi antar masyarakat indonesia yang multikultural di era global; mengetahui sejauh mana pentingnya Pancasila dalam menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat indonesia di era global dan memberikan gambaran kepada generasi muda akan pentingnya rasa toleransi masyarakat indonesia yang multikultural ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵

II. TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia adalah suatu negara multikultural yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, agama dan golongan yang kesemuanya merupakankekayaan tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Selo Soemardjan mengemukakan bahwa pada waktu disiapkannya Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila tampaknya para pemimpin kita menyadari realitas bahwa dit tanah air kita ada aneka ragam kebudayaan yang masing-masing terwadahkan didalam suatu suku. Realitas ini tidak dapat diabaikan dan secara rasional harus diakui adanya. *Founding Father* bangsa menyadari

¹⁴ Agus Fauzi, "Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia." *Lentera Hukum* 4, No. 2 (2017): 122-130.

¹⁵ *Ibid*, hlm 17.

bahwa keragaman yang dimiliki bangsa merupakan realitas yang harus dijaga eksistensinya dalam persatuan dan kesatuan bangsa.¹⁶

Keragaman-keragaman yang ada, sering disebutkan dengan istilah yang berbeda-beda, Muhammad Yusri FM (2008: 1) mengungkapkan bahwa ada tiga istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda, yakni pluralitas (*plurality*), keragaman (*diversity*), dan multikultural (*multicultural*). Ketiga-tiganya sama-sama merepresentasikan hal samayaitu keadaan lebih dari satu atau jamak. Lebih lanjut Farida Hanum dan Setya Raharja menjelaskan bahwa keragaman itu berpengaruh terhadap tingkah laku, sikap, dan pola pikir manusia, sehingga manusia memiliki cara-cara (*usage*), kebiasaan (*folk ways*), aturan-aturan (*mores*) bahkan adat istiadat (*customs*) yang berbeda satu sama lain. Bilamana keadaan di atas tidak dapat dipahami dengan baik oleh pihak satu dan lainnya, maka akan sangat rawan terjadi persinggungan-persinggungan yang kemudian berbuah pada adanya konflik.¹⁷

Disinilah perlu kiranya nilai-nilai multikultural mengambil perannya. Nilai-nilai multikultural dikatakan dalam bahasa visi-misi pendidikan multikultural dengan selalu menegakkan dan menghargai pluralisme, demokrasi, dan humanisme, kemudian dengan ketiga hal tersebut siswa diharapkan menjadi generasi yang selalu menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, kepedulian humanistik, dan kejujuran dalam berperilaku sehari-hari.¹⁸

¹⁶ Imam Tholikhah, "Potensi Intoleransi Keagamaan Siswa Sekolah di Jawa dan Sulawesi." *Edukasi* 11, No. 1 (2013): 294716.

¹⁷ *Ibid* hlm 42.

¹⁸ *Ibid* hlm 43.

Sementara itu menurut H.A.R Tilaar menjelaskan beberapa nilai-nilai multikultural yang ada, sekurang-kurangnya terdapat indikator-indikator sebagai berikut: belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya (*mutual trust*), memelihara saling pengertian (*mutual understanding*), menjunjung sikap saling menghargai (*mutual respect*), terbuka dalam berpikir, apresiasi dan interdependensi, resolusi konflik dan rekonsiliasi nir kekerasan. Sedangkan untuk memahami nilai-nilai multikultural secara umum terdapat empat nilai inti (*core values*) antara lain: Pertama, apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat.¹⁹ Kedua, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia. Ketiga, pengembangan tanggung jawab masyarakat dunia. Keempat, pengembangan tanggung jawab manusia terhadap planet bumi.²⁰

Multikulturalisme secara etimologis terbentuk dari tiga kata yaitu: Multi (banyak), Kultur (budaya), Isme (aliran/paham). Yang berarti multikulturalisme adalah aliran atau paham tentang banyak budaya yang berarti mengarah pada keberagaman budaya. H.A.R Tilaar, menegaskan bahwa multikulturalisme mengandung pengertian yang sangat kompleks yaitu "*multi*" yang berarti plural, "*kulturalisme*" berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralism bukan sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis-jenis tetapi pengakuan-pengakuan itu juga mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, ekonomi. H.A.R Tilaar mendefinisikan lebih lanjut istilah multikulturalisme yang berarti institusionalisasi dari keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnis di dalam suatu nation-state melalui bidang-bidang

¹⁹ *Ibid* hlm 44.

²⁰ *Ibid* hlm 44.

atau sistem hukum, pendidikan, kebijakan pemerintah dalam kesehatan dan perumahan, bahasa, praktik-praktik keagamaan dan bidang lainnya.²¹

Sementara itu menurut Parekh pengertian multikulturalisme meliputi tiga hal. *Pertama*, multikulturalisme berkenaan dengan budaya; *kedua*, merujuk pada keragaman yang ada; *ketiga*, berkenaan dengan tindakan spesifik pada respon terhadap keragaman tersebut. Akhiran "isme" menunjukkan suatu doktrin normatif yang diharapkan bekerja pada setiap orang dengan konteks masyarakat dengan beragam budaya. Sedangkan Musa Asy'arie berpendapat bahwa multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera muncul, jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kemestian hidup yang kodrati, baik dalam kehidupan diri sendiri yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, dan karenanya muncul kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamik kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan.²²

Istilah multikulturalisme marak digunakan pada tahun 1950 di Kanada. Istilah ini diderivasi dari kata *multicultural* yang dipopulerkan surat kabar-surat kabar di Kanada, yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat multikultural dan multilingual. Pengertian tentang multikulturalisme memiliki dua ciri utama: *pertama*, kebutuhan terhadap

²¹ Anas Saidi, "Relasi Pancasila, Agama dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 11, No. 1 (2009): 25-50.

²² Imam Tholkhah, 2013

pengakuan (*the need of recognition*), kedua, legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya.²³

Dalam bukunya, H.A.R. Tilaar mengatakan bahwa sesudah Perang Dunia II gerakan multikulturalisme berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi karena adanya migrasi penduduk dunia yang disebabkan oleh antara lain kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan kembali sesudah Perang Dunia II itu. Selain itu dalam *Declaration of Human Rights* diakui setiap orang untuk hidup di negara lain dengan mendapatkan hak-hak yang sama. Di negara Jerman terdapat kelompok manusia yang cukup besar berasal dari Eropa Timur dan Turki. Migrasi penduduk asing tersebut dikenal sebagai pekerja-tamu (*gast arbeiter*). Para pekerja tamu tersebut ada yang kemudian menjadi warganegara Jerman dan dihargai akan nilai-nilai kebudayaannya sendiri meskipun tentunya harus tunduk kepada hukum dari negara yang didatangi. Di Prancis terdapat kelompok besar kaum migran dari Afrika bekas jajahan Prancis.²⁴

Di Inggris paham multikultural selain dijadikan kupasan akademik di Universitas Birmingham sebagai Studi Kultural telah membahas mengenai adanya budaya elit dan budaya rakyat biasa (*common people*) yang kedua-duanya mempunyai derajat yang sama. Demikian pula pada era sesudah Perang Dunia II kekuatan Partai Buruh semakin meningkat yang tentunya membawa kebudayaan rakyat biasa untuk diakui di dalam masyarakat Inggris. Di Amerika Serikat paham multikultural telah lahir dari perlawanan terhadap politik segregasi yang membedakan antara kebudayaan kulit putih dan

²³ I Gusti Ayu Rachmi Handayani. "Pancasila Sumber Nilai Keberagaman Beragama Bangsa Indonesia". *Jurnal Seminar Nasional Hukum* 3, No. 1 (2016).

²⁴ M. Abdul Khaliq Hasan, "Merajut Kerukunan dalam Keragaman Agama di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran)." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, No. 1 (2016): 66-77.

kebudayaan kulit hitam. Adalah Dr. Martin Luther King yang pada tahun 1965 menggusur paham segregasi ketika dia memimpin demonstrasi di Washington D.C. Gerakan penghapusan segregasi tersebut ditegaskan dalam Kongres Pendidikan Tinggi se-Amerika di University of Illinois pada tahun 1990. Dengan demikian dapat dikatakan politik dan praksis segregasi dalam kehidupan Amerika termasuk di dalam dunia pendidikannya telah dihapuskan. Sebagai hasilnya antara lain ialah lahirnya seorang Obama, sebagai Presiden Amerika Serikat yang berdarah campuran kulit hitam.²⁵

Parsudi Suparlan menuliskan, —Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku-bangsa atau kebudayaan suku-bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multi-kulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multi-kulturalisme akan harus mau tidak mau akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas (Suparlan, 2002). Multikulturalisme lahir dari benih-benih konsep yang sama dengan demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip etika dan moral egaliter sosial-politik (Fay, 1996; Rex, 1985 dalam Suparlan, 2002).²⁶

Lahirnya paham multikulturalisme berlatar belakang kebutuhan akan pengakuan (*the need of recognition*) terhadap kemajemukan budaya, yang menjadi realitas sehari-hari banyak bangsa, termasuk

²⁵ *Ibid* hlm 11.

²⁶ Stev Koresy Rumagit, "Kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia." *Lex Administratum* 1, No. 2 (2013).

Indonesia. Oleh karena itu, sejak semula multikulturalisme harus disadari sebagai suatu ideologi, menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan penghargaan atas kesetaraan semua manusia dan kemanusiaannya yang secara operasional mewujudkan melalui pranata-pranata sosialnya, yakni budaya sebagai pemandu kehidupan sekelompok manusia sehari-hari. Dalam konteks ini, multikulturalisme adalah konsep yang melegitimasi keanekaragaman budaya. Kita melihat kuatnya prinsip kesetaraan (*equality*) dan prinsip pengakuan (*recognition*) pada berbagai definisi multikulturalisme: —Multikulturalisme²⁷ pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007).

Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan (Parekh, 1997 yang dikutip dari Azra, 2007).²⁷

Multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan serta penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain (Lawrence Blum, dikutip Lubis, 2006:174), sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Suparlan, 2002, merangkum Fay 2006, Jari dan Jary 1991, Watson 2000).

²⁷ *Ibid* hlm 17.

Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut (A. Rifai Harahap, 2007, mengutip M. Atho' Muzhar).²⁸

Konsekuensi dari multikulturalisme adalah sikap menentang dan anti terhadap, atau setidaknya bermasalah dengan, monokulturalisme dan asimilasi yang merupakan norma-norma wajar dari sebuah negara bangsa sejak abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif, sebab yang dituju oleh monokulturalisme adalah homogenitas, sekalipun homogenitas itu masih pada tahap harapan atau wacana dan belum terwujud (*pre-existing*). Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan untuk mewujudkan menjadi satu kebudayaan baru. Pertentangan antara multikulturalisme dan monokulturalisme tampak nyata sekali dari asumsi dasar yang saling berseberangan, yang satu melegitimasi perbedaan sementara yang lain meminimalisir perbedaan.²⁹

Keragaman merupakan suatu kewajaran sejauh disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Kemajemukan ini tumbuh dan berkembang ratusan tahun lamanya sebagai warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hefner (dalam Mahfud, 2009: 83) memaparkan bahwa: Pluralisme

²⁸ Moh Abdul Kholiq Hasan, 2013.

²⁹ Natal Kristiono, 2017.

kultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura sangatlah mencolok, terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu. Karena itulah dalam teori politik Barat dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini, khususnya Indonesia dipandang sebagai “*lokus klasik*” bagi konsep masyarakat majemuk/plural (*plural society*) yang diperkenalkan ke dunia Barat oleh JS Furnivall.³⁰

Menurut Din Syamsudin selaku Presiden Komite Keagamaan dan Perdamaian Asia dalam acara *World Culture Forum* (WCF) 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2016 di Nusa Dua Bali, bahwa untuk membangun persatuan melalui multikulturalisme, *pertama*, harus ada kesadaran tentang pentingnya multikulturalisme, yang dalam pandangan Islam adalah hukum (ketetapan) Tuhan, dan *kedua*, mengembangkan budaya dalam masyarakat untuk saling menghargai dan tenggang rasa. Memang ada perbedaan di antara kelompok masyarakat, tetapi di sisi lain, juga ada persamaan, oleh karena itu penting mencari titik temu. Indonesia sangat beruntung karena pendiri bangsa ini telah mewariskan dua pedoman yang bisa menyatukan kemajemukan dalam masyarakat, yakni Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Perlu semangat kebersamaan, kerjasama, dan berbagi atas nama kemanusiaan tanpa memandang perbedaan untuk menguatkan persatuan di antara masyarakat dengan budaya yang beragam.³¹

Menurut Magnis-Suseno (2005: 216), bangsa Indonesia yang multikultur mutlak harus dipandang dari kaca mata multikulturalisme, Indonesia hanya dapat bersatu, bila pluralitas yang menjadi kenyataan sosial dihormati. Artinya, penegakan kesatuan

³⁰ Anas Saidi, 2009.

³¹ *Ibid* hlm 34.

Indonesia bukan hendak menghilangkan identitas setiap komponen bangsa, tetapi harapannya agar semuanya menjadi warga negara Indonesia tanpa merasa terasing. Sikap saling menghormati identitas masing-masing dan kesediaan untuk tidak memaksakan pandangan sendiri tentang “yang baik” kepada siapapun merupakan syarat keberhasilan masa depan Indonesia.³²

Perbedaan suku, ras dan agama praktis menjadi senjata yang jitu untuk menciptakan konflik horizontal dalam berbagai kepentingan. Komnas HAM mencatat, telah terjadi peningkatan laporan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pada 2015 laporan yang masuk kepada Komnas HAM tercatat meningkat, dari 74 pengaduan pada tahun 2014 menjadi 87 pengaduan, di mana dalam tiap pengaduan dapat mencakup lebih dari satu tindakan. Peningkatan laporan kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan juga nampak dalam laporan Wahid Institute yang naik di tahun 2015 mencapai 190 peristiwa dengan 249 tindakan. Jumlah ini naik 23 persen dari tahun 2014 di mana jumlah peristiwa yang dilaporkan 158 peristiwa dengan 187 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sedangkan tahun 2016 hingga awal 2017 ini, kondisi bangsa Indonesia tidak juga memberikan sinyal penurunan, konflik-konflik yang mengatasnamakan agama justru cenderung meningkat. Seperti halnya kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan yang baru-baru ini terjadi di Depok. Satpol PP kota Depok pada 23 Februari 2017 menyegel masjid Al-hidayah milik Jemaat Ahmadiyah Sawangan, sehingga beberapa anggota Jama'ah Ahmadiyah hanya dapat melakukan sholat Jumat di pelataran masjid, kendati didesak untuk tidak melakukannya dan mendapatkan ancaman.³³

³² Anas Saidi, 2009.

³³ *Ibid* hlm 35.

Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah serta pandangan hidup bangsa, yang di dalamnya terkandung nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Selain itu Pancasila sebagai ideologi terbuka setidaknya memiliki dua dimensi nilai-nilai, yaitu nilai-nilai ideal dan aktual. Namun nilai-nilai itu kondisinya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawa globalisasi, sehingga berdampak terjadinya pergeseran peradapan, yang juga membawa perubahan pemaknaan dan *positioning* Pancasila (Sultan Hamengku Buwono X, Kongres Pancasila IV, UGM 2012). Pengaruh-pengaruh budaya asing akan bisa dihindari jika kita generasi muda mampu menyaring budaya asing dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar acuan dalam kehidupan kita.

Pancasila yang memiliki semboyan ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, dengan pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh “rasa bersama” dalam idiom *nation-state* berikut semangat nasionalisme yang menyertainya. Sri Edi Swasono berpendapat, nasionalisme menegaskan bahwa kepentingan nasional harus diutamakan, tanpa mengabaikan tanggung jawab global. Dengan demikian Pancasila memiliki makna yang berbeda akan tetapi tetap satu, banyak ragam tetapi tetap mewujudkan persatuan. Seperti halnya yang dituliskan oleh Empu Tantular: “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa”. Menunjukkan bahwa Pancasila merupakan alat persatuan dari keanegaraman yang ada di negara Indonesia, multikultural dan juga pluralistik bangsa Indonesia. Tan Hana Darma Mangrwa menurut Empu Tantular adalah tidak ada kewajiban yang mendua, artinya hanya demi bangsa dan negara. Inilah wujud loyalitas yang diharapkan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa”. Loyalitas pada bangsa dan

Negara Indonesia, rasa nasionalisme dan patriotism terhadap bangsa dan negara Indonesia.³⁴

Selanjutnya Sri Edi Swasono mengatakan, bahwa bila pemuda-pemudi Indonesia tidak mampu berwawasan Nusantara, tidak tahu tanah airnya sendiri, tidak tahu sabang merauke dan keanekaragaman di dalamnya, maka ini merupakan cacat embrional bagi nasionalisme Indonesia. Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin dari kata "*Tolerare*" yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain (Ihsan, 2009:24-25).³⁵

Dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan kata toleransi adalah *samanah* atau *tasamuh*, artinya sikap lapang dada atau terbuka dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia (Enginer, 2004:8). Dengan demikian, makna kata *tasamuh* memiliki keutamaan, karena melambangkan sikap pada kemulian diri dan keikhlasan.

Dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia, pluralitas telah melahirkan kolaborasi yang indah dalam berbagai bentuk muzaid budaya yang kental dengan kemajemukan. Artinya berbagai suku, agama, ras adat-itiadat, budaya dan golongan dapat hidup berdampingan dan memiliki ruang negosiasi yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari yang kita kenal dengan toleransi. Kuntowijoyo (1985) menjelaskan bahwa keindahan masyarakat

³⁴ Ramdhan Witarsa, et al. "Pengaruh penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial siswa sekolah dasar." *Pedagogik (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)* 6, No. 1 (2018): 9-20.

³⁵ Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Lesfi, 1992).

negeri katulistiwa seperti Indonesia menjadi kesaksian bagi dunia internasional. Akan tetapi, dunia pun “terhentakkan dengan tercabik-cabiknya” keindahan oleh sikap eksklusif yang tumbuh dari akar primordialisme sempit kesukuan, agama, ras, dan golongan tertentu dalam bentuk konflik. Berbagai konflik yang dilatarbelakangi oleh agama, etnis, bahasa, ekonomi, dan politik tidak bisa dihindari (Rasimin, 2016:100). Salah satu penyebab konflik yang sering terjadi pada masyarakat multikultural adalah konflik yang dilatar belakangi sikap intoleran antar masyarakat Indonesia baik dari segi agama, budaya, politik, ekonomi dsb.³⁶

Pertama yang harus dimengerti dari definisi toleran-intoleran adalah merupakan sebuah “tindakan”, bukan pikiran, apalagi sebuah aturan. Disebut toleran, menurut Cohen (2004) adalah *tindakan yang disengaja oleh actor dengan berprinsip menahan diri dari campur tangan (menentang) perilaku mereka dalam situasi keragaman, sekalipun actor percaya dia memiliki kekuatan untuk mengganggu* (Cohen 2004, hal. 69). Artinya, didalam toleransi terkandung dua kata kunci, yang sekaligus berperan sebagai prinsip, yaitu (1) “kesengajaan” (*intent*), dan (2) “tidak-mengganggu” (*Non-interference*). Keduanya adalah element yang sama penting.³⁷

Russell Powell dan Steve Clarke dalam *Religion, Tolerance and Intolerance: Views from Across the Disciplines*, bahkan memposisikan elemen “tidak-mengganggu” sebagai inti dari toleransi. Dan sikap tidak-mengganggu ini harus bersifat *direct*, atau “tidak-mengganggu-secara langsung”. Powel memberi contoh: Seorang Katolik disebut toleran adalah dia yang membolehkan praktik keagamaan Protestan di masyarakat, sekalipun dia tidak setuju dan punya kemampuan

³⁶ Hildgardis MI. Nahak, "Upaya melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, No. 1 (2019): 65-76.

³⁷ Hildgardis M. I. Nahak, 2019.

melarang tapi justru memilih tidak menggonggonya (lihat Powell & Clarke, Oxford Univ, p.4-5). Contoh lain mungkin kita temukan; Seorang Muslim (M) yang membolehkan perayaan natal sahabatnya yang Nasrani (N), sekalipun M memilih tidak mengucapkan "Selamat Natal" kepada sahabatnya itu karena dia tahu bahwa hal itu bertentangan dengan keyakinannya. Maka dalam perspektif Powell dan Clark, M adalah seorang yang toleran karena sengaja menahan dirinya dari tindakan tidak setuju, seraya membolehkan ibadah ritual Natal berjalan tanpa gangguannya.³⁸

Artinya, hanya dengan "sengaja-tidak-mengganggu" (*intent to non-interfere*) terhadap orang lain maka seorang disebut toleran. Sengaja menjadi sangat penting, sebab jika seorang tidak-mengganggu hanya karena acuh dan abai maka dia belum dapat disebut toleran. Sementara arti "intoleransi" adalah kebalikan dari semua prinsip yang terdapat dalam toleransi. Ada setidaknya 3 komponen intoleransi; (1) ketidak-mampuan menahan diri tidak suka kepada orang lain, (2) sikap mencampuri dan atau menentang sikap atau keyakinan orang lain, dan (3) sengaja-mengganggu orang lain.

Menurut Hunsberger (1995), intoleran adalah tindakan negatif yang dilatari oleh simplifikasi-palsu, atau "prasangka yang berlebihan" (*over generalized beliefs*). Prasangka semacam ini memiliki tiga komponen; (1) komponen kognitif mencakup stereotip terhadap "kelompok luar yang direndahkan"; (2) komponen afektif yang berwujud sikap muak atau tidak suka yang mendalam terhadap kelompok-luar; dan (3) komponen tindakan negatif terhadap anggota kelompok-luar, baik secara interpersonal maupun dalam hal kebijakan politik-sosial (Hunsberger's, 1995:113-29).

³⁸ Indra Wicaksono, "Membumikan Pancasila Arti Penting Menegakkan HAM Sebagai Tameng Toleransi Keberagaman." *Lex Scientia Law Review* 2, No. 2 (2018): 169-176.

Menurut Haidt (2001), ketiga komponen prasangka cenderung saling mempengaruhi mengingat sifat pikiran dapat berpengaruh negatif dan memberi reaksi terhadap sikap muak, dan tidak suka. Dan secara logika memang tidak sulit untuk membayangkan bagaimana sikap negatif dapat memediasi tindakan negatif. Powel dan Clarke juga mengafirmasi hal ini, bahwa seorang yang berpikir negatif belum tentu mau bertindak intoleran. Meskipun, kombinasi ini mungkin sebuah pengecualian (Powell & Clarke: 18). Artinya, seorang yang bertindak intoleran bisa dipastikan memiliki pandangan stereotip/negatif kepada orang. Tapi sebaliknya, seorang yang hanya berpikir negatif boleh jadi bukan seorang yang intoleran. Korelasi yang longgar antara pikiran dan tindakan membuat ukuran untuk mengidentifikasi seorang atau kelompok tergolong toleran atau intoleran menjadi tidak mudah. Toleransi bahkan menjadi aneh ketika diukur dengan angka-angka statistik, sekalipun bukan mustahil itu dilakukan. Dalam konteks Ruang Publik, idealnya, wilayah ini harus nihil dari klaim-klaim subjektif apalagi tindakan diskriminatif. Jurgen Habermas, sang konseptor Ruang Publik, menggarisbawahi tiga poin penting tentang ruang publik ideal yaitu: (1) Partisipasi dan non-diskriminasi. Yaitu, ruang publik harus menjadi sebuah forum terbuka untuk semua. (2) Otonomi, yaitu ruang publik harus otonom karena lingkungan otonom kondusif bagi perdebatan kritis dan rasional. Dan (3) Berisikan debat Rasional atau analitis, yang merupakan esensi ruang publik (Habermas 1989: 36). Artinya, sebuah Ruang Publik Beragama yang ideal adalah wilayah bersama yang menampung segala cetusan keberagaman tanpa halangan apapun. Maksudnya, segala sikap dan simbol

keagamaan kelompok manapun untuk diizinkan tampil dan dirayakan.³⁹

Maka *stereotype* terhadap kelompok tertentu seharusnya tidak boleh terjadi, hanya karena simbol dan cetusan beragama mereka yang khas, seperti; jenggot, jubah, atau wanita yang berhijab dan berkalung salib. Maka larangan terhadap kelompok tertentu yang ingin mengekspresikan ibadahnya di lapangan monas dan di jalan-jalan jelas adalah intoleransi. Termasuk kasus pemotongan nisan salib di Jogja baru-baru ini. Sekalipun dengan dalih atas dasar kesepakatan. Karena disitu terselip “prasangka”. Namun pengakuan kesetaraan agama dalam ruang public harusnya tidak dipahami secara ‘sembarangan’ dengan maksud mempersatukan agama-agama dalam konteks teologisnya yang khas, melainkan semata dalam ranah dialogis-sosiologis. Dialogalitas semacam itulah yang dapat mempertemukan agama-agama dalam damai, tanpa harus “melucuti” keberimanan masing-masingnya. Karena, “Toleransi bukan asimilasi. Kita perlu menghormati keberadaan mereka dalam keberlainan mereka.” demikian menurut romo Franz Magnis. Serupa dengan konsep *Tasamuh* dalam Islam, yaitu menghormati keberbedaan agama lain dengan prinsip yang teguh tanpa perlu saling bersinggungan.

Globalisasi dan kemajuan internet ikut menciptakan pra kondisi timbulnya peristiwa kekerasan di Selandia Baru. Tampak seolah-olah penyebaran ideologi ekstrem dan kekerasan yang mengikutinya sebagai hal yang tak terelakkan di zaman sekarang. Tetapi, kita tidak boleh tunduk pada ideologi itu. Ideologi ekstrem bukan sebuah keniscayaan. Dengan semangat berbela rasa kita memiliki kekuatan

³⁹ Ainun Mardia Harahap, "Konsep dan Strategi Pendidikan Karakter di Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum 2013." *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 4, No. 1 (2016).

untuk mencegah dan mengakhiri perkembangan ideologi ekstrem penuh kekerasan.⁴⁰

Solidaritas dan dukungan kepada para korban dari berbagai kalangan yang ditunjukkan warga dunia pasca-insiden di Christchurch menunjukkan manusia mempunyai daya besar untuk mengalahkan teror. Ideologi ekstrem yang memecah belah bisa dikalahkan dan tunduk pada solidaritas dan empati yang tulus. Ideologi ekstrem yang membuahkan kebencian memang bisa menghinggapi siapa saja.⁴¹

Kekerasan yang berakar pada ideologi kebencian dapat dilakukan siapa saja. Tetapi, solidaritas, sikap menghargai perbedaan, dan empati akan mampu menyingkirkan semua itu dan tidak memberi ruang bagi kebencian untuk tumbuh. Sikap intoleran yang ditunjukkan oleh pelaku penembakan adalah contoh betapa sikap intoleran hanya membawa kekerasan dan kehancuran. Sikap intoleran hanya menjadikan manusia serigala bagi yang lain.⁴²

Masih segar dalam ingatan kita, Senin, 4 Februari 2019 yang lalu telah terbit dokumen Human Fraternity yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam besar Al Azhar Dr. Ahmed al-Tayeb. Dokumen ini merupakan dokumen bersejarah bagi dunia karena berisi 12 hal yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat sekarang untuk menciptakan perdamaian dan kedamaian dunia. Pada poin pertama dikatakan, "Keyakinan bahwa agama berakar pada nilai-nilai perdamaian, saling pengertian, persaudaraan manusia, keharmonisan, membangun kembali kebijaksanaan, keadilan, dan cinta." Agama

⁴⁰ Dicky Hastjarjo, "Mengembangkan pemikiran kritis mahasiswa." *Buletin Psikologi* VII, No. 1 (1999).

⁴¹ Zuly Qodir, "Kaum muda, intoleransi, dan radikalisme agama." *Jurnal Studi Pemuda* 5, No. 1 (2016): 429-445.

⁴² Agus Fauzi, 2017.

selalu diyakini sebagai pemersatu semua orang untuk menciptakan perdamaian di tengah masyarakat. Melalui agama diharapkan semua sikap intoleran, ekstremisme dan radikalisme dihilangkan.⁴³

Lebih jauh dalam poin keenam dikatakan, "Perlindungan tempat ibadah adalah kewajiban yang dijamin hukum dan perjanjian internasional. Setiap upaya penyerangan tempat ibadah atau mengancam mereka dengan serangan kekerasan, pemboman atau kerusakan, merupakan penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum internasional." Dan, kita semua bisa melihat sikap masyarakat Selandia Baru pasca-insiden itu. Mereka berbondong-bondong ke masjid untuk melindungi saudara-saudari Muslim yang sedang beribadah. Sikap toleran dan saling melindungi seperti inilah yang seharusnya dihidupi oleh kita semua. Masyarakat Selandia Baru telah menunjukkan kepada dunia apa yang harus dilakukan untuk sesama saudara yang membutuhkan pertolongan dan perlindungan.

Dokumen Human Fraternity menguraikan tentang satu keyakinan dari krisis dunia modern, yaitu hati nurani manusia yang kehilangan kepekaan dalam bentuk menjauhkan diri dari nilai-nilai agama. Ada kontradiksi dunia modern; di satu sisi ada kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di sisi lain terjadi kemunduran nilai-nilai dan spiritual. Akibatnya, ada rasa frustrasi dan keterasingan yang menyebabkan orang jatuh dalam pusaran ekstremisme dan intoleransi. Sikap intoleran pada dasarnya tidak pernah membawa perdamaian dan kita mesti melawannya. Dalam kasus di Selandia Baru sudah sepantasnya kita melawannya. Tak ada tempat untuk intoleran karena hanya membawa kita pada

⁴³ Anas Saidi, 2009.

kehancuran dan perpecahan. Sudah lebih dari cukup kita menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang intoleran. Terlalu banyak air mata yang terbuang dan darah yang tak bersalah mengalir.⁴⁴

Krisis toleransi selalu berakhir pada pertumpahan darah dan kekerasan terhadap yang lain. Empat puluh sembilan nyawa tak bersalah menjadi korban ekstremisme, intoleransi, dan radikalisme. Kekerasan atas nama ekstremisme, intoleransi, dan radikalisme adalah fenomena yang kerap kita jumpai dan bahkan telah tumbuh subur dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika semua orang yang punya kehendak baik bersatu untuk melawan ekstremisme, intoleransi, dan radikalisme agar paham-paham itu tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Mari kita bersamasama melawannya.⁴⁵ Peneliti Wahid Institute Alamsyah M Dja'far menilai maraknya penyebaran kebencian melalui media sosial ini sebagai gejala intoleransi. "Intoleransi itu gejala yang paling bisa dilihat di media sosial jadi harus ada upaya untuk menetralsir atau merespon ujaran-ujaran kebencian di media sosial dan melakukan pembatasan terhadap *website-website* yang berisi ujaran kebencian, dan itu tugas masyarakat untuk melaporkan masalah semacam itu dan bisa ditindaklanjuti," jelas Alamsyah. Dia mengatakan masyarakat dan juga aparat harus mewaspadainya dan berupaya agar pesan intoleran itu tidak menyebar luas dan memicu tindakan kekerasan. "Tentu yang lain kalau ada ujaran kebencian, kekerasan dan diskriminasi itu dibatasi oleh aparat kalau tidak dia bisa menjadi

⁴⁴ Dhanang Respati Puguh, "Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya: kebijakan budaya semarang dalam perspektif sejarah." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 2, No. 1 (2017): 48-60.

⁴⁵ Natal Kristiono, 2017.

viral dan bisa menjadi kekerasan", kata Alamsyah kepada BBC Indonesia.⁴⁶

Lebih jauh, Alamsyah mencermati media sosial sering kali juga dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan intoleran menjelang pemilihan kepala daerah ataupun ketika pemilihan presiden yang lalu. Dia mengatakan penyebaran pesan intoleran itu cenderung meningkat menjelang pilkada ataupun pilpres yang sarat dengan muatan politik. "Itu terjadi manakala ada kesempatan, dan *opportunity* yang biasa dipakai adalah momen politik seperti pilkada dan pilpres, saya kira pemerintah, aparat dan masyarakat luas harus berhati-hati agar memastikan bahwa pemanfaatan kesempatan ini tidak berlebihan dan menimbulkan ledakan kekerasan, jadi ketika ada kekerasan itu bisa meningkat dan saya kira itu PR kita semua," jelas Alamsyah. Menurut Damar, pesan intoleran memang meningkat di media sosial belakangan ini, tetapi perlu dibuktikan lebih jauh apakah berkaitan dengan munculnya politik identitas.

Menurut Damar, politik identitas bisa memunculkan pesan-pesan intoleran ataupun tidak. "Tidak kalau dalam komunikasinya dipakai untuk membalas perilaku marginalisasi di masa lalu kepada yang menindas. Dalam hal ini, misalnya politik identitas Islam, harusnya ya tertuju ke pemerintahan Orde Baru yang bertahun-tahun merepresi mereka. Tapi ya kalau dalam komunikasinya dipakai justru untuk gantian menindas kelompok identitas yang berbeda," jelas Damar. Damar menyarankan jika menemukan pesan yang intoleran sebaiknya tidak menyebarluaskan dan lakukan dialog dengan kelompok yang menyebarkan pesan tersebut. "Jangan-jangan mereka lupa ini Indonesia yang bhinneka, jangan-jangan

⁴⁶ Moh Abdul Kholiq Hasan, 2013.

mereka lupa ini Indonesia dan bukan negara milik suku, agama, ras tertentu" tambah Damar.⁴⁷

Sementara itu dalam pidato pembukaan di Forum Demokrasi Bali, Presiden Jokowi menyoroti masalah toleransi dengan mengatakan perbedaan agama seharusnya tidak menjadi penghalang untuk demokrasi dan toleransi antar negara dan sesama manusia. Presiden juga mengatakan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai agama. "Sejarah Indonesia mengajarkan bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai. Nilai mengenai perdamaian inilah yang sampai saat ini terus dipegang oleh umat Islam Indonesia. Selain Islam, Indonesia adalah rumah bagi umat Kristiani, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusius. Nilai-nilai perdamaian juga dipegang teguh oleh semua umat di Indonesia," jelas Jokowi.⁴⁸

Hasil survei Wahid Institute bersama Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2016 ditemukan potensi bahwa kerawanan intoleransi di Indonesia tergolong masih sangat mengkhawatirkan. Dari total 1.520 responden sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatarbelakang agama non muslim, kelompok tionghoa, komunis, dan selainnya. Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Sebanyak 82,4 persennya bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka (Kompas.com, 1/8/2016).

Berdasarkan hasil survey di atas dapat dikatakan bahwa lambat laun bangsa ini akan mengalami krisis intoleransi yang sangat besar apabila tidak diatasi dengan bijak melalui berbagai program-program

⁴⁷ Imam Tholkhah, 2013.

⁴⁸ Anas Saidi, 2009.

penguatan nilai-nilai Pancasila, toleransi dan kebhinekaan secara masif di tengah masyarakat kita. Penyebaran paham-paham radikal kini sangat terstruktur dan sistematis di masyarakat kita baik melalui lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, lembaga dakwa, maupun komunitas-komunitas sosial yang ada di masyarakat. Metode-metode penyebaran yang digunakan pun sangat *soft* dan bahkan prinsip dan nilai agama pun digunakan sebagai pembenaran untuk menghalalkan cara yang mereka tempuh. Metode ini pun bahkan cukup signifikan mempengaruhi cara berpikir dan tindakan masyarakat kita yang sikap kritis masih sangat rendah.⁴⁹

Pancasila sebagai dasar dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara merupakan suatu kekuatan yang menyatukan seluruh elemen masyarakat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Mauroke dengan berbagai latar belakang suku dan budaya, ras serta agama yang berbeda-beda. Pancasila digali atas dasar kekayaan budaya, religius, dan moral masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tentu bersifat mutlak dan memiliki keutamaan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Masyarakat bangsa Indonesia harus berbangga dan bersyukur bahwa dengan Pancasila kita semua dapat dipersatukan. Pancasila sejatinya menjadi modal dasar dan sumber kecerdasan dalam membangun peradaban pembangunan bangsa Indonesia yang adil dan beradab.⁵⁰

Pancasila harus direfleksikan dan diimplementasikan secara real oleh semua masyarakat bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Pancasila

⁴⁹ Zuly Qodir, 2016.

⁵⁰ *Ibid* hlm 25.

apabila dimaknai secara mendalam tentu bisa membawa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan yang dahulu telah ditanamkan dalam setiap benak anak bangsa. Seluruh masyarakat bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga dan melestarikan Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya dari pengaruh-pengaruh radikalisme dan sikap intoleran yang memecah belakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semua elemen bangsa apapun itu suku, agama, etnis wajib mendukung dan berani bersuara menegakan Pancasila.⁵¹

Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) menurut Hans Kelsen dan norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) menurut Hans Nawiasky. Menurut Soekarno Pancasila merupakan *filosofische grondslag*, yaitu sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang mendalam. Pancasila merupakan pemersatu bangsa dan pandangan hidup (*way of life*), sehingga Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, maka setiap materi muatan peraturan materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014b). Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan atas hukum, Pancasila harus selalu dijadikan rujukan dalam pembangunan hukum. Adapun sumber-sumber Pancasila sebagai dasar negara antara lain nilai keagamaan, adat istiadat, kebudayaan, nilainilai yang hidup dalam masyarakat, dan perkembangan ideologi dunia pada saat itu (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014c).

Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara yang tidak dipersoalkan bahkan kuat, maka Pancasila itu harus dijadikan

⁵¹ *Ibid*

paradigma (kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaharuannya. Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis, dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya, sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik, tempat hukum menjadi salah satu alatnya, dan karenanya juga harus bersumber darinya (Mahfud MD, 2010a). Sebagai paradigma pembangunan hukum, Pancasila memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada hukum-hukum yang menanam benih disintegrasi. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan demokrasi (negara hukum). Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban (Mahfud MD, 2010b).⁵²

Kehadiran negara melalui lembaga khusus Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang dibentuk oleh presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 merupakan angin segar bagi bangsa dan diharapkan mampu merekonsolidasikan pemahaman Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila

⁵² Stev Koresy Rumagit, 2013.

diharapkan pula bisa merangkul semua institusi lembaga pendidikan dan komunitas sosial serta keagamaan agar kembali membumikan Pancasila dalam berbagai aktivitas masyarakat. Pancasila jangan sampai hanyalah sebuah selogan atau tulisan belaka, akan tetapi Pancasila semestinya menjadi *lifestyle* yang harus dihayati oleh setiap masyarakat bangsa ini. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) memiliki tanggung jawab untuk kembali menyadarkan seluruh elemen masyarakat bangsa agar terus menerus ditumbuhkan rasa memiliki Pancasila. Jiwa dan semangat Pancasila yang merupakan *The Power of National Ideology* harus mampu menjadi penggerak dalam setiap proses aktivitas pembangunan bangsa Indonesia serta dalam menghadapi setiap permasalahan bangsa yang ada.⁵³

Saat ini banyak kalangan memperbincangkan mengenai generasi millennial Indonesia yang pada umumnya pelajar dan mahasiswa. Namun, studi tentang generasi millennial ini belum menyentuh hal-hal yang substansial. Generasi millennial sendiri dapat diartikan sebuah generasi yang lahir antara tahun 1980-2000 atau generasi muda masa kini berusia antara 15–34 tahun. Selain pemuda pada umumnya, generasi millennial ini juga didalamnya adalah pelajar dan mahasiswa. Generasi millennial memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap berbagai perkembangan teknologi digital dan online terkini. Ketergantungan terhadap teknologi ini membuat generasi millennial dapat dikatakan sebagai generasi yang sangat berbeda karakteristik dan memiliki keunikan tersendiri dalam menerima dan mengtransfer segala informasi dan pengetahuan yang diperoleh jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.⁵⁴

⁵³ Natal Kristiono, 2017.

⁵⁴ *Ibid* hlm 26.

Namun, beberapa penelitian mengatakan bahwa generasi millennial ini merupakan salah satu kelompok generasi yang sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh radikalisme dan tindakan intoleran ditengah derasnya arus informasi yang beredar di media sosial dan internet. Sebab, banyak informasi-informasi yang tidak difilter dan bahkan menjadi tidak terkendali. Bahaya gerakan anti terhadap Pancasila dan gerakan radikalisme juga kini mulai nampak dan merebak di kalangan pelajar serta mahasiswa yang merupakan kelompok dari generasi millennial ini. Melihat kenyataan ini maka, penanaman nilai-nilai Pancasila sudah semestinya mengfokuskan dan mengakomodasi kelompok generasi millennial dengan sebuah formulasi atau metode-metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan kecanggihan teknologi saat ini. Sehingga, generasi millennial ini tidak bersifat apatis dengan pembelajaran nilai-nilai pancasila dan bersikap kritis terhadap pengaruh ideologi-ideologi radikal serta sikap-sikap intoleran. Pancasila harus bisa dijadikan pegangan dan prinsip hidup generasi millennial Indonesia dalam menghadapi derasnya kemajuan teknologi modern saat ini. Generasi millennial harus mampu mengamalkan Pancasila, bhineka tunggal ika dan nilai-nilai toleransi bangsa Indonesia agar tetap eksis dan berdiri kokoh.⁵⁵

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Sebagaimana yang ditunjukan dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1979, maka Pancasila itu adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara kita. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan/filsafat hidup. Dalam pergaulan hidup

⁵⁵ *Ibid* hlm 36.

terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Dengan demikian, pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga harus berdasarkan pada Bhineka Tunggal Ika yang merupakan asas pemersatu bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman.⁵⁶

Hakekat Bhineka Tunggal Ika sebagai perumusan dalam salah satu penjabaran arti dan makna Pancasila menurut Notonegoro adalah bahwa perbedaan itu adalah kodrat bawaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, namun perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan dan diperuncingkan melainkan perbedaan itu untuk dipersatukan, disintesis dalam suatu sintesa yang positif dalam suatu negara kebersamaan, Negara Persatuan Indonesia. Setiap bangsa mempunyai cita-cita untuk masa depan dan menghadapi masalah bersama dalam mencapai cita-cita bersama. Cita-cita kita sebagai bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur materil dan spirituan berdasarkan Pancasila. Seperti halnya keluarga, suatu bangsa yang bertekad mencapai cita-cita bersama memerlukan suatu pandangan hidup. Tanpa pandangan hidup, suatu bangsa akan terombang ambing. Dengan pandangan hidup suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai.⁵⁷

⁵⁶ Agus Fauzi, 2017.

⁵⁷ Anas Saidi, 2009.

III. PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN MENGHADAPI INTOLERANSI KEHIDUPAN BERAGAMA DI INDONESIA DALAM ARUS GLOBALISASI

Manusia sebagai makhluk hidup menurut Otto Soemarwoto memiliki tiga kebutuhan dasar yang bersifat hierarkhis yakni:

1. Kebutuhan dasar hayati contohnya air, udara, dan makanan.
2. Kebutuhan dasar manusiawi, perwujudan kebutuhan dasar ini menunjukkan bahwa manusia tidak cukup dengan pemenuhan kebutuhan dasar hayati saja, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan akan disesuaikan dengan kemampuan manusia yang mengenal adanya rasa, warna, dan bentuk.
3. Kebutuhan dasar memilih. Kebutuhan ini terkait dengan kemampuan manusia untuk menciptakan budaya sehingga melampaui kebutuhan hayatinya.⁵⁸

Terkait dengan pemenuhan ketiga kebutuhan dasar tersebut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa perkembangan peradaban kemampuan manusia memungkinkan untuk berfilsafat tentang hakekat dan martabat dirinya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan manusia lain, alam, dan Penciptanya yang tercermin dalam ajaran agama. (Otto Soemarwoto 2008: 67). Agama mengutip definisi yang dikemukakan Mukti Ali (mantan menteri agama RI) merupakan suatu (sistem) kepercayaan pada adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum-hukum yang diwahyukan kepada utusan-Nya bagi kebahagiaan hidup dunia dan akherat. Agama merupakan manifestasi hakekat kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Sehubungan agama terkait langsung dengan

⁵⁸ Greg Genep Sukendro, *Pancasila Riwayatmu Kini* (Jakarta: Tifa dan Grafisosial, 2012).

hakekat manusia, maka agama termasuk tahap perkembangan awalnya dalam sejarah kehidupan manusia baik itu animism, dinamisme, maupun keyakinan/kepercayaan lainnya selalu mengalami tumbuh kembang sejalan dengan kehidupan manusia.⁵⁹

Bangsa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, tidak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, bahasa dan ras, tetapi juga termasuk masalah agama. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, ada beberapa agama dan keyakinan lain yang juga dianut penduduk ini. Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu adalah contoh agama yang juga tidak sedikit dipeluk oleh warga Indonesia. Setiap agama tentu punya aturan masing-masing dalam beribadah. Namun perbedaan ini bukanlah alasan untuk berpecah belah. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, setiap warga Indonesia berkewajiban menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia agar negara ini tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dan mencapai tujuannya sebagai negara yang makmur dan berkeadilan sosial.⁶⁰

Namun di balik keragaman tersebut, munculah suatu tantangan atau masalah yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu masalah intoleransi dalam kehidupan beragama. Banyak kasus-kasus yang terjadi akibat rasa toeransi yang kurang antara sesama umat beragama di Indonesia. Kekerasan atas Nama Agama demikian banyak terjadi semasa tahun 2009-2013 tidak kurang dari 56 kasus, seperti dilaporkan oleh Setara Institute dan Centre for Religion and Cultural Studies (CRCS), UGM dalam laporan tahunnya.⁶¹ Sedangkan tahun 2016 hingga awal 2017 ini, kondisi bangsa

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 33.

⁶⁰ *Ibid*.

⁶¹ *Ibid*, hlm 34

Indonesia tidak juga memberikan sinyal penurunan, konflik-konflik yang mengatasnamakan agama justru cenderung meningkat. Seperti halnya kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan yang baru-baru ini terjadi di Depok. Satpol PP kota Depok pada 23 Februari 2017 menyegel masjid Al-hidayah milik Jemaat Ahmadiyah Sawangan, sehingga beberapa anggota Jama'ah Ahmadiyah hanya dapat melakukan sholat Jumat di pelataran masjid, kendati didesak untuk tidak melakukannya dan mendapatkan ancaman.⁶²

Kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia ini membuat negara kita ini dianggap tidak aman untuk melaksanakan rutinitas-rutinitas, dan ritual-ritual keagamaan. Hal ini pun membuat publik Indonesia dianggap tidak aman bagi negara-negara internasional. Pemerintah Indonesia didesak untuk mengatasi intoleransi kehidupan beragama oleh *Human Rights Watch*. *Human Rights Watch* menilai, Indonesia gagal merespons meningkatnya kekerasan terhadap agama minoritas, termasuk Ahmadiyah, Kristen, dan Syiah. Mereka pun meminta pemerintah Indonesia agar mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi intoleransi beragama. Indonesia perlu mengakui bahwa hukum dan kebijakan telah menindas kelompok agama minoritas melalui kekerasan dan diskriminasi.⁶³

Media massa memiliki peranan yakni sebagai sarana penyampai informasi dan edukasi bagi segenap masyarakat Indonesia. Aspek mendidik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari media massa. Berita yang dimuat mengenai suatu hal akan menjadi bahan bagi masyarakat karena aspek dari berita itu sendiri yaitu pemberi informasi pada masyarakat. Media massa sebagai agen perubahan dituntut untuk selalu bertanggung jawab karena perannya sebagai

⁶² BBC Indonesia, *Online* <<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39076611>>

⁶³ Stev Koresy Rumagit, 2013.

penyalur opini kepada publik. Untuk itu, berita yang dimuat oleh media massa harus menjadi tolak ukur dalam kebudayaan toleransi antar umat beragama yaitu sebagai aspek penyatu bagi setiap lapisan masyarakat. Peranan media sebagai instrumen komunikasi memberikan sumbangan besar terhadap mobilitas personal bahkan sosial kemasyarakatan. Mustahil dinafikkan bahwa pertumbuhan media masa kini telah membentuk pola pikir masyarakat.⁶⁴

Peran media masih sangat signifikan dalam menyebarkan informasi kepada khalayak luas. Media memiliki target audiens yang beragam, sehingga berita yang disajikan tentu akan jelas bervariasi sesuai kebutuhan audiens yang ditargetnya. Dalam era keterbukaan informasi, media tampil sebagai pusat informasi ekspansif ditandai dengan cepatnya berita masuk serta dirilis untuk masyarakat.⁶⁵

Saat ini media cetak, elektronik, dan sosial telah menjamur ditingkat lokal dan nasional. Sebagai bagian dari praktek sistem demokrasi, media merupakan corong utama informasi sosial politik yang juga berguna bagi sarana berpikir bagi masyarakat, tidak hanya untuk berpolitik, tetapi juga memberikan dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia. Media turut serta membangun kesadaran masyarakat mengenai isu yang sedang berkembang di negara mereka tinggal (McDevitt (1996:270), serta Lindsey (1994: 163) menyatakan bahwa media memiliki peran sentral dalam menyaring informasi dan membentuk opini masyarakat (Medinah Suarti. *BatamToday.com*, 16 Juni 2015).⁶⁶

Ketika masyarakat yang sangat majemuk di Indonesia ini diberikan akses informasi melalui media tanpa batas, sebenarnya hal ini

⁶⁴ *Ibid*, hlm 58.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 57.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 58.

memberikan dampak positif dan negatif. Masyarakat dapat menjadi lebih teliti dalam mendapatkan informasi, sehingga apa yang diserapnya bukan hanya berita-berita yang sifatnya lebih mengarah kepada provokasi, namun juga bagaimana mereka menjadi dapat bersikap dengan lebih bijaksana dan tidak terpancing emosinya.⁶⁷

Contoh yang sangat terlihat dalam hal terkait di atas adalah di media sosial, di mana terjadi penyebaran tautan berita serta respon masyarakat dapat langsung dilihat dalam interaksi berupa komentar-komentar yang bahkan dapat direspon langsung dalam bentuk persetujuan maupun ketidaksetujuan.

Menariknya, dari interaksi sosial masyarakat tersebut justru dapat dilihat sikap masyarakat, terutama yang berkaitan dengan isu keberagaman dan toleransi yang akhir-akhir ini banyak diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Keterbukaan reaksi masyarakat akan suatu berita pada saat ini merupakan ciri demokrasi, suatu hal yang sangat mahal dibandingkan pada masa pemerintahan Soeharto. Pada masa sekarang, tidak ada keraguan bagi masyarakat untuk memberikan kritik keras terhadap isu-isu yang berkembang.⁶⁸

Lebih jauh lagi, isu tentang etnis dan agama yang seharusnya tidak menjadi isu yang dibesar-besarkan karena masyarakat Indonesia tinggal dalam keberagaman semakin sering diberitakan, dan tidak jarang respon-respon negatif yang justru menafikan keberadaan keberagaman lebih sering muncul dan cenderung lebih menampilkan saling berbalas pernyataan dan komentar (Santosa, 2017:199-214). Hal ini pada akhirnya akan berujung pada tajamnya

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 59.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 60.

segregasi kelompok mayoritas dan minoritas, dua kubu yang lebih dilihat dari identitas etnis dan agama (Saerang, 2000:12).

Sebagai alat untuk kontrol sosial, maka media seharusnya bisa berperan lebih signifikan dalam kehidupan keberagaman masyarakat di Indonesia. Isi berita dalam media memang berada dalam koridor yang sudah lebih bebas diakses masyarakat, dan memang tidak dapat disalahkan pula jika pada akhirnya isi berita dianggap semakin dapat memperuncing situasi yang sudah panas, seperti yang terjadi dalam berita pembakaran tempat ibadah di Tanjung Balai, Tolikara, dan beberapa kasus lainnya.⁶⁹

Objektivitas pemberitaan media apa pun itu diperlukan untuk menghindari salah tanggap dari masyarakat, sehingga isu yang berhubungan dengan etnis dan agama tidak semakin memperparah konflik antara dua kelompok mayoritas dan minoritas, sekaligus mereduksi kecurigaan satu sama lain. Jadi, kajian ini tidak menyudutkan eksistensi media tertentu, tetapi lebih pada peran masyarakat dalam menggunakan media sosial terutama dalam menyampaikan peristiwa sosial yang tidak salah dan menimbulkan isu intoleransi.⁷⁰

Pancasila sebagai dasar falsafah negara terdapat dalam alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” bukan saja menjadi dasar rohani dan dasar moral kehidupan bangsa, melainkan secara implisit juga mengandung toleransi beragama. Konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang didasarkan pada sila pertama Pancasila, yang kemudian menjawai dari Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Toleransi beragama dalam hal ini menghargai agama

⁶⁹ Eko Digdoyo, 2018.

⁷⁰ *Ibid*

dan kepercayaan orang lain, menghormati agama dan kepercayaan walaupun tidak mempercayai doktrin ajaran agamanya.⁷¹

Sesuai dengan bunyi sila kesatu Pancasila diatas, kita dapat mengetahui bahwa semua warga negara Indonesia harus berlaku bijak dan wajib untuk menghargai serta menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia termasuk dalam arus informasi atau bersosial media. Kita harus bisa menyaring berita-berita yang sensitif mengenai perbedaan agama dan tidak terprovokasi dengan berita-berita yang tersebar di media yang kebenarannya masih diragukan, sehingga meminimalisir munculnya konflik-konflik intoleransi yang berkembang di masyarakat agar persatuan di Indonesia tetap terjaga.

IV. PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN MENGHADAPI INTOLERANSI BUDAYA DI INDONESIA DALAM ARUS GLOBALISASI

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal ini memunculkan suatu kenyataan yang tak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat yang beragam budaya.

Konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari

⁷¹ *Ibid*, hlm 43.

237.000.000 jiwa yang tinggal tersebar di pulau-pulau Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi.

Tidak hanya keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa tetapi juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban tradisional hingga ke modern dan kewilayahan. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa antara satu dengan yang lainnya mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Hingga pada akhirnya, prinsip persatuan sangat dibutuhkan karena keseragaman suku, bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu. Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan, tetapi tidak boleh di seragamkan. Dengan demikian, prinsip persatuan Indonesia tidak dipersempit maknanya.

Untuk dapat bersatu, sudah semestinya membutuhkan suatu pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman tersebut adalah Pancasila.⁷²

Pancasila dalam hal ini berperan sebagai pedoman hidup yang berperan dalam menghubungkan pagar pembatas keberagaman. Hal ini sejalan dengan rumusan Pancasila, yaitu sila ketiga yang berbunyi; persatuan Indonesia. Pada sila ini, menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan. Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan karena persatuan nasib, juga bangsa yang terikat tanah airnya. Bangsa yang akan tetap terjaga dari kemungkinan mempunyai sifat Chauvinisme.

⁷² Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013).

Persatuan sendiri berasal dari kata satu yang berarti utuh tidak dapat dipecah-pecah. Persatuan juga menyiratkan arti adanya keberagaman dalam pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan.⁷³

Namun dalam hal ini, tantangan terhadap ancaman multikultural semakin marak dikalangan masyarakat. Munculnya isu-isu tidak jelas yang memecahbelahkan citra Indonesia yang diagungkan sebagai negara kesatuan. Dalangnya tidak lain adalah kemajuan IPTEK yang sebagai imbas dari globalisasi. Kemajuan IPTEK menyebabkan kemajuan diberbagai bidang, salah satunya adalah semakin cepatnya akses informasi. Namun kemajuan ini sering kali tidak dibarengi dengan adanya filter terhadap apa saja yang masuk. Masyarakat cenderung bersikap terbuka terhadap budaya baru. Dan yang dikhawatirkan adalah munculnya anggapan bahwa budaya baru lebih unggul daripada budaya sendiri padahal belum tentu budaya baru ini cocok dengan implementasi Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia.

Lunturnya eksistensi jatidiri bangsa ini biasanya ditandai dengan hilangnya nilai-nilai luhur Pancasila dalam masyarakat Indonesia sendiri. Hal ini akan berimbas pada perubahan moral baik sikap dan perilaku masyarakat. Salah satunya yang patut kita sorot adalah sikap toleransi. Kita tahu betul Indonesia adalah negara multikultural. Akan tetapi sampai saat ini isu-isu keragaman budaya /multikultural masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan di Indonesia. Perbedaan yang ada menimbulkan gesekan antar golongan dengan pemikiran yang menganggap golongannya sendiri

⁷³ Widyastuti, Retno. "Strategi Pendidikan Karakter dalam Mengantisipasi Paham Radikal dan Intoleran di Sekolah." *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 2, No. 2 (2021): 187-201.

yang paling benar.⁷⁴ Dengan kemajuan informasi seperti sekarang ini yang seharusnya memudahkan komunikasi malah semakin memicu terjadinya pergesekan.

Wadah komunikasi dan persebaran informasi yang kerap memicu perpecahan yang dimaksud adalah media sosial dan media massa. Seringkali pengguna media sosial intolelir mengenai apa yang mereka tulis dan dampak dari tulisan mereka. Kerap kali didapati cercaan baik berupa cibiran atau olokan yang mengarah pada penghinaan ras maupun budaya. Padahal pengguna media sosial berkemungkinan hanya ingin menyinggung satu dua oknum saja, namun tidak memikirkan bahwa yang ia singgung bukan hanya satu oknum melainkan satu ras maupun budaya. Dari perasaan tersinggung tersebut akan muncul konflik. Dari konflik tersebut akan menimbulkan perpecahan. Begitu pula pada media massa.

Media massa memiliki peranan yakni sebagai sarana penyampai informasi dan edukasi bagi segenap masyarakat Indonesia. Aspek mendidik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari media massa. Berita yang dimuat mengenai suatu hal akan menjadi bahan bagi masyarakat karena aspek dari berita itu sendiri yaitu pemberi informasi pada masyarakat.³⁾ Namun, media massa ini kerap kali disalah gunakan keberadaannya. Media massa ini kerap kali digunakan sebagai ajang provokasi sebagai alat pemecah belah bangsa.

Selain itu, pola hidup masyarakat masa kini dengan masa dahulu sangatlah berbeda. Hal ini juga merupakan dampak dari arus globalisasi sehingga perlu penanganan yang lebih baik. Dampak lain dari globalisasi yaitu berkembangnya teknologi-teknologi canggih yang sangat membantu manusia namun juga dapat merusak mental

⁷⁴ Eko Digdoyo, 2018.

dan moral generasi muda. Sebagai contoh pada Masyarakat NTT yang dahulunya sangat menjunjung tinggi budaya gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang pertanian, namun pada saat ini masyarakat cenderung menggunakan mesin mulai dari menanam hingga proses penggilingan padi, sehingga budaya gotong royong yang sangat kental dalam masyarakat perlahan-lahan mulai dilupakan pada generasi muda.⁷⁵

Padahal kebudayaan adalah sebagai proses, yaitu upaya masyarakat untuk menjawab tantangan yang dihadapkan kepadanya.⁷⁶ Jika kebudayaan saja sudah mulai terkikis, maka bagaimana masyarakat menghadapi tantangan seperti perkembangan IPTEK yang tengah marak sekarang ini, sedangkan dalam konteks ini masyarakat menganggap kebudayaan sebagai proses. Perkembangan IPTEK memberikan dampak yang sangat nyata sekali. Contoh nyatanya saja penggunaan gadget. Pengguna gadget ini secara berangsur-angsur mengalami perubahan sikap dan tingkah laku akibat terlalu fokus dengan gadget. Hal ini menciptakan sebuah keadaan dimana pengguna dan gadgetnya tidak bisa dilepaskan. Dimanapun kapanpun menggunakan gadget. Hingga lupa waktu dan emosionalnya pun terganggu. Menurut hasil riset gadget adalah masalah serius yang dialami oleh setiap lapisan jenjang hal ini akan berakibat pada timbulnya sikap kurang peka dan bahkan cenderung tidak peduli terhadap lingkungannya. Masalah ini tentunya sangat membahayakan perkembangan sosial.⁷⁷

Membahayakan perkembangan sosial yang dimaksud adalah adanya pergolakan karakter kebangsaan Indonesia yang tanpa kita sadari

⁷⁵ Hildigardis M. I. Nahak, 2019.

⁷⁶ Musya Asy'ary, 1991.

⁷⁷ Ramdhan Witarsa, et al., 2019.

sudah mulai luncur dan berkultur dengan budaya asing. Pada dasarnya perbaikan karakter bangsa ini merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki, membentuk, dan membangun kembali pondasi nilai-nilai luhur bangsa yang dicitakan dalam butir-butir pancasila.⁷⁸ Kita tahu betul akibat era globalisasi ini, menyebabkan arus informasi semakin pesat. Akibatnya akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin besar. Apabila proses ini tidak dibendung, akan berakibat lebih serius dimana pada puncaknya mereka tidak bangga lagi terhadap bangsa dan negaranya. Dan pada akhirnya kebudayaan yang satu dengan yang lainnya pun tidak lagi dianggap suatu penghargaan atas dasar keberagaman.

Hal-hal tersebut akan berujung pada perilaku saling intoleransi terhadap budaya yang seharusnya mereka banggakan keberadaannya. Intoleransi sendiri dalam konteks kebudayaan ialah pandangan dan sikap meremehkan kebudayaan, suku, maupun ras yang berbeda.⁸⁾ Masalah yang sering menyebabkan keberadaan pancasila terancam. Mengenai intoleransi keberagaman di Indonesia masih terlihat bahkan ditahun-tahun politik persoalan mengenai intoleransi semakin kompleks. Persoalan intoleransi saat ini lebih dominan kepada perbedaan budaya, ras, dan suku apalagi mengingat kita adalah negara yang multikultural. Maka akan lebih rawan terjadi perpecahan.

Jika intoleransi tumbuh di Indonesia maka hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh pancasila. Padahal toleransi sendiri sudah menjadi suatu nilai yang diterapkan dalam pergaulan

⁷⁸ Syarbaini Syahril, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015).

bermasyarakat di berbagai wilayah nusantara semenjak dahulu, sehingga sudah menjadi karakter bangsa Indonesia. Namun jika seperti kenyataannya bahwa Intoleransi telah tumbuh dan berkembang, maka disinilah karakter bangsa perlu di perhatikan.

Karakter bangsa sendiri tidak boleh lepas dari pedoman Pancasila. Karena menurut Selo Soemardjan, pada waktu disiapkannya Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila tampaknya para pemimpin kita menyadari realitas bahwa di tanah air kita ada aneka ragam kebudayaan yang masing-masing terwadahkan di dalam suatu suku.⁷⁹ Karena Pancasila pun sudah disesuaikan terhadap bangsa Indonesia, maka Pancasila lah yang digunakan sebagai pedoman. Pedoman ini juga harus dibarengi dengan adanya ketahanan pribadi yang ditumbuh kembangkan sesuai dengan kemajuan jaman dan berdasar pada pedoman kebangsaan.

Ketahanan pribadi yang ditumbuhkembangkan perlu didasari oleh prinsip-prinsip yang benar serta nilai-nilai luhur yang dapat dipetik dari agama, tradisi, dan peran pendidikan sehingga secara selektif mampu menerima atau menolak pengaruh lingkungan. Ketahanan pribadi yang ditumbuhkembangkan dari kepribadian Pancasila ini harus memiliki ciri-ciri antara lain:

1. Memiliki rasa percaya diri dan berpegang pada prinsip.
2. Bebas dari rasa ketergantungan tetapi mendambakan kebersamaan.
3. Memiliki jiwa dinamis kreatif dan pantang menyerah.⁸⁰

Ketahanan pribadi ini dapat diwujudkan dengan adanya pengukuhan karakter diri masing-masing. Dan kita tahu betul muda-

⁷⁹ Lestari Gina, 2015.

⁸⁰ Soedarsono Soemarno, *Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional* (Jakarta: PT Intermasa, 1997).

mudi bangsa diharapkan menjadi agen of change kelak. Jadi, sudah semestinya pengukuhan karakter ini dimulai sejak dini. Pengenalan dasar-dasar karakter yang cinta tanah air, berjiwa toleransi yang tinggi, dan memiliki jiwa patriotis dapat dibentuk melalui pendekatan dari sekolah maupun dari perguruan tinggi. Sekolah adalah sarana dipertemukannya keberagaman yang akan menjadikan suatu pengajaran mengenai toleransi dasar dalam pendidikan karakter.

Pendidikan karakter pada hakikatnya merupakan pendidikan yang berusaha membiasakan dan menebarkan kebajikan. Dengan demikian, pendidikan karakter bukan terletak pada materi pembelajaran, melainkan pada aktivitas yang melekat, mengiringi dan menyertai suasana yang mewarnai, tercermin dan melingkupi proses pembelajaran, pembiasaan sikap dan perilaku yang baik. Dengan demikian pendidikan karakter tidak berbasis materi tetapi lebih menekankan pada kegiatan.⁸¹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter bukan mengenai teori namun mengenai pelaksanaannya di lapangan bahkan tanpa mereka sadari.

Namun bukan tidak penting adanya pengukuhan melalui teori. Hal ini sama pentingnya jika kita telisik lebih jauh. Contohnya seperti diadakannya pembelajaran mengenai pendidikan kewarganegaraan pada jenjang SD, SMP, maupun SMA/SMK dan pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi. Guna memantapkan para generasi baru untuk menghadapi tantangan seperti Intoleransi yang akhir-akhir ini marak terjadi.

⁸¹ Ainun Mardia Harahap, "Konsep dan Strategi Pendidikan Karakter di Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum 2013." *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 4, No. 1 (2016).

Negara kita memanglah terkesan lucu. Kita dielu-elukan sebagai negara dengan toleransi yang tinggi. Namun kenyataannya jika dipancing sedikit saja dengan isu-isu yang tidak jelas asalnya langsung meluap-luap. Hingga menimbulkan konflik, kerusakan bahkan hingga korban jiwa. Dimanakah sila ketiga Pancasila yang di agungkan itu? Ini bukan mengenai salah Pancasila atau salah perumus Pancasila. Akan tetapi ini adalah salah para bangsa Indonesia sendiri yang terlalu lucu untuk mengakui bahwa dirinyalah yang menjadikan kobaran api semakin membesar. Mereka sendiri yang meniup dan mereka sendiri yang mengeluh.

Kejenakaan ini juga tersirat dalam suratan kalimat pada buku *Manusia Indonesia* karya Mochtar Lubis yang tertulis "Seorang Ksatria utama harus menjauhkan diri dari sifat congkak (*adigang-adigung*) dalam kesukaran apapun tetap tabah dan menjunjung tinggi darmanya sebagai manusia utama."⁸² Namun sepertinya kebudayaan dalam bentuk tulisan-tulisan para pujangga itu hanya tinggal gurau saja, bahkan dijadikan bahan ejekan dan tertawaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi akan berpengaruh pada lunturnya budaya sedangkan apabila budaya luntur maka timbulah intoleransi dan masalah-masalah lainnya.

Dalam hal ini kita perlu lebih mengkritisi hal ini lebih lanjut. Mengukuhkan kembali nilai-nilai Pancasila dan merestrukturisasi kebudayaan agar tidak kalah dengan budaya baru. Karena pada dasarnya masyarakat khususnya kalangan generasi milenial seperti sekarang ini lebih tertarik dengan hal-hal yang baru. Makadari itu, marilah kita bersama-sama menciptakan suatu inovasi terbaru budaya yang dapat bersaing di kancah internasional. Jangan hanya kita mudah terpecah-belah hanya karena isu-isu belaka.

⁸² Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Keberagaman ini bukanlah ajang Intoleransi, melainkan peluang kita mengencarkan inovasi kulturasi budaya yang saling bahu-membahu dalam mewujudkan cita-cita Indonesia tanpa mengkhianati pancasila.

Apalagi mengingat peran generasi milenial ini adalah sebagai *agent of change* yang pada dasarnya dituntut berpikir kritis. Kritis dalam hal ini adalah "kecenderungan dan ketrampilan untuk melakukan aktivitas dengan skeptisisme reflektif yang terfokus pada pengambilan keputusan terhadap apa yang diyakini atau dilakukan".⁸³ Sehingga semestinya bijak dalam mengambil keputusan. Keputusan untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang patut di contoh dan mana yang tidak. Semua ini bergantung pada perspektif masing-masing. Namun kembali lagi, jika tidak sesuai dengan pedoman kita, pancasila itu bukanlah merupakan hal yang baik untuk bangsa kita juga. Kebudayaan bukan untuk ditinggalkan. Kebudayaan, baik nilai maupun warisan turun-temurun wajib dijaga.

Oleh karena itu, perlunya diberlakukan suatu politik kebudayaan yang berupa langkah-langkah strategis untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan.⁸⁴ Hal ini dilakukan dengan membuat kebijakan budaya dan mengimplementasikannya secara konsisten dan berkelanjutan. Tanpa adanya penyama-nyamaan antar budaya karena budaya memiliki karakteristik dan keunggulannya masing-masing yang berbeda setiap daerahnya.

⁸³ Dicky Hastjarjo, 1999.

⁸⁴ Dhanang Respati Puguh, 2017.

V. PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN MENGHADAPI INTOLERANSI KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA DALAM ARUS GLOBALISASI

Sikap individualisme berarti menganggap dirinya sendiri lebih penting daripada kepentingan orang lain, seperti kasus yang berada di Kota-kota besar yang sekarang lagi marak-maraknya, kasus ini ditulis oleh Aditya Fajar Irawan di yang berjudul *Anak Pidanakan Orang Tua Tanda Masyarakat RI Makin Individualis* hal itu dikarenakan sebuah masalah yang sama yaitu perebutan aset. Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Derajad Sulistyio Widhyharto, menilai salah satu penyebabnya karena perubahan nilai norma di masyarakat yang sudah berubah dengan mementingkan diri sendiri. Salah satu perubahannya terlihat dari berubahnya ukuran hidup dari nonmaterial menjadi material.

Padahal sudah jelas tertera di dalam Pancasila yang dijadikan ideologi dasar bangsa Indonesia yang diwariskan para pendiri bangsa dan melanggar beberapa sila dalam Pancasila:

- a) Pancasila sila ke 1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan atau makhluk sosial agar dapat mengendalikan diri dan kepentingannya untuk memahami hak dan kewajiban pada tiap-tiap individu.
- b) Pancasila sila ke 2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” yang berarti mampu mencintai sesama manusia dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan bertoleransi setinggi mungkin.

Sikap individualism biasanya juga disebabkan karena beberapa faktor diantaranya:

1. Globalisasi

Globalisasi menurut Selo Soemarjan (2002: 70) adalah “suatu proses terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama memberikan pengaruh serta dampak bagi masyarakat”. Salah satu dampaknya adalah timbul sikap individualisme yang disebabkan karena kemajuan dari teknologi yang semakin canggih,⁸⁵ sehingga menyebabkan mereka merasa tidak membutuhkan orang lain dan pada akhirnya mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan maupun dibutuhkan. pertolongannya, darisitu lah mulai muncul kurangnya rasa kemanusiaan yang menyebabkan hilang rasa kepedulian antar sesama manusia. Tidak hanya itu saja, dampak dari globalisasi yang lebih menakutkan adalah tergerusnya nilai-nilai yang menjadi jati diri asli bangsa.⁸⁶

2. Internet (Media Sosial)

Zaman globalisasi seperti ini internet menjadi sebuah kebutuhan penting yang tak kalah pentingnya dengan kebutuhan primer, banyak fitur internet yang dibuat hanya untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran serta hati mereka. Padahal biasanya mereka yang sering mengungkapkan melalui dunia maya dalam kehidupan aslinya adalah orang yang cenderung menutup diri, mereka memiliki banyak teman pada dunia maya sehingga menggunakan media sosial sebagai sarana berinteraksi, tetapi berkebalikannya dengan dunia nyata dimana hanya memiliki sedikit teman dan hanya melakukan interaksi dengan kapasitas minimum. Kesimpulannya, media sosial dapat dapat berfungsi

⁸⁵ M. Insyah Musa, "Dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia." *Jurnal Pesona Dasar* 3, No. 3 (2015).

⁸⁶ Siti Wulan Agustina, and Dina Indriyani. "Dampak Globalisasi Terhadap Perilaku Belajar Siswa di SMK Negeri 1 Cianjur." *Integralistik* 30, No. 1 (2019).

untuk memperluas pertemanan, tetapi juga menciptakan gangguan dalam kehidupan sosial⁸⁷

3. *Gadget*

Smartphone merupakan barang yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat pada zaman globalisasi. Bahkan hampir tidak mungkin jika mereka pergi atau keluar dalam keadaan tidak membawa *gadget/handphone*. Zaman globalisasi sekarang ini yang menyebabkan semua orang asyik bermain gadget nya sendiri walaupun ada kerabat di sekitarnya, ini membuat individualism seseorang meningkat.

4. Kurang Bersosialisasi

Definisi sosialisasi menurut Charlotte Buhler (1978:55) adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya. Pada hakikatnya setiap individu adalah makhluk sosial yang mempunyai dorongan untuk bermasyarakat , ini berarti bahwa manusia terdorong untuk melakukan pergaulan atau berinteraksi dengan orang lain. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keramahatmahannya, tetapi seiring adanya globalisasi proses sosialisasi semakin pudar. Biasanya masyarakat yang kurang akan kemampuan dalam bersosialisasi dikarenakan darimana mereka berasal, apabila mereka berasal dari keluarga yang terpandang mereka biasanya berfikir memiliki segalanya dan tidak membutuhkan orang lain.

Sikap individualisme yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya memberi dampak bagi orang disekitar, tetapi juga memberi dampak kepada individu itu sendiri. Selain diakibatkan karena

⁸⁷ Agustinus Sugeng Priyatno, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. (Semarang: UNNES PRESS, 2018).

adanya lingkungan darimana ia berasal, tetapi lingkungan itu juga yang akan memberikan reaksi apabila ada masyarakat yang berperilaku seperti itu, kebanyakan dari mereka semua biasanya akan mendapat reaksi dari masyarakat sekitar untuk dikucilkan, hal itu diakibatkan karena ia merasa dapat melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain, sehingga membuat ia tidak peduli dengan keadaan sekitar dan merasa tidak dibutuhkan dalam lingkungannya. Padahal hakikatnya, anggota masyarakat yang hidup pada suatu wilayah tertentu saling tergantung satu dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸⁸

Bagi beberapa orang, sikap individualisme memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri untuk mengembangkan sikap kemandiriannya, tetapi selain memiliki dampak positif bagi individu itu sendiri hal ini juga memberikan dampak negatif bagi dirinya sendiri:

1. Egois

Egois adalah perilaku untuk selalu mengutamakan dirinya sendiri, susah diberi pengertian, tidak mau tahu kondisi dari orang lain, yang diketahui hanya dirinya sendiri, bahkan hal ini bisa timbul prasangka dari orang lain apabila ia tidak mau tahu kondisi dari orang lain tersebut. Prasangka dari orang lain juga mengandung semacam kecenderungan dasar yang kurang menguntungkan orang atau kelompok tertentu,⁸⁹ yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi orang yang bersikap seperti itu. Perilaku manusia seperti ini biasanya didorong oleh

⁸⁸ A. Sudarsono, *Buku Pengantar Sosiologi*. (Yogyakarta: UNY PRESS, 2016).

⁸⁹ D. A. Sobur, *Buku Psikologi Umum*. (Pustaka Setia, 2016).

tuntutan, hasrat dan kemauan yang ada dalam dirinya untuk mencapai apa yang diinginkan tanpa ada suatu halangan.⁹⁰

2. Merasa dirinya yang paling benar

Sikap individualisme disebabkan karena kurangnya bersosialisasi antar manusia, dengan kurangnya sosialisasi ini menyebabkan kurangnya interaksi dengan sesama. Definisi interaksi menurut Gillin (dalam Soekanto, 2007:55) merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut antara orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Interaksi sosial juga merupakan kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama, Young dan W. Mack (dalam Soekanto, 2007: 54) dengan adanya kurang interaksi, menyebabkan seseorang kurang menghargai dari pendapat orang lain, karena menurutnya apa yang dilakukan sudah yang paling terbaik dan tidak ingin disalahkan.

3. Tidak Peduli Dengan Orang Lain

Menurut Bender (2003) kepedulian adalah menjadikan diri kita terkait dengan orang lain dan apapun yang terjadi terhadap orang tersebut. Orang yang mengutamakan kebutuhan dan perasaan orang lain daripada kepentingannya sendiri adalah orang yang peduli. Orang yang peduli tidak akan menyakiti perasaan orang lain. Mereka selalu berusaha untuk menghargai, berbuat baik, dan membuat yang lain senang. Banyak nilai yang

⁹⁰ Meilanny Budiarti Santoso, "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (2017): 104-109; Shofiyatul Azmi, "Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah Satu Pengejawantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, dan Makhluk Religi." *Likhitaprajna* 18, No. 1 (2016): 77-86.

merupakan bagian dari kepedulian, seperti kebaikan, dermawan, perhatian, membantu, dan rasa kasihan. Menurut Bintarto (1989: 54), bahwa kesibukan setiap warga dalam tempo yang cukup tinggi dapat mengurangi perhatian terhadap sesamanya. Apabila hal ini berlebihan akan menimbulkan sifat acuh tak acuh atau kurang mempunyai toleransi sosial. Kepedulian dimulai dengan kesadaran terhadap orang lain, kesadaran untuk berempati kepada orang lain. Individualisme menyebabkan kurangnya kepedulian terhadap seseorang yang membutuhkan bantuan kita, biasanya orang itu bersikap acuh, tanpa disadari ia lupa bahwa kodratnya hanya sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan.

4. Tidak bisa bekerjasama dengan seseorang atau kelompok tertentu

Sikap Individualisme disebabkan karena kurangnya komunikasi antar sesama, ia menganggap tidak membutuhkan siapapun karena menurutnya dia bisa melakukannya sendiri, tetapi apabila kondisinya diubah dalam suatu kegiatan ini mengakibatkan kurangnya mengimbangi pendapat dalam kelompoknya sendiri, sehingga sikap individualisme lah yang menyebabkan kurangnya kerjasama dengan seseorang. Sikap Individualisme disebabkan karena kurangnya komunikasi antar sesama, ia menganggap tidak membutuhkan siapapun karena menurutnya dia bisa melakukannya sendiri, tetapi apabila kondisinya diubah dalam suatu kegiatan ini mengakibatkan kurangnya mengimbangi pendapat dalam kelompoknya sendiri, sehingga sikap individualisme lah yang menyebabkan kurangnya kerjasama dengan seseorang.

Dari sini kita bisa melihat bahwa dampak negatif dari individualisme sebenarnya lebih mengarah berdampak pada individu kita sendiri

dan akan kita juga yang mendapat reaksi dari warga masyarakat sekitar, seperti akan dikucilkan oleh sekelilingnya, selain itu hal ini juga membuat kita jauh dari orang-orang yang sebenarnya ingin peduli dengan keadaan kita, oleh karena itu sebagai makhluk hidup yang dikodratkan sebagai makhluk sosial yang mana hakikatnya adalah untuk saling menolong ketika ada yang membutuhkan dan saling melengkapi seharusnya kita membenahi dari masing-masing pribadi untuk menjadi yang lebih baik dan lebih bersifat terbuka apabila ada yang meminta tolong sehingga tercapainya harapan sesuai dengan etika sosial yang mengedepankan toleransi, peduli terhadap sesama, mencintai, saling memahami, saling menghargai, saling menolong. Oleh karena itu mari kita mencari tahu solusi apa yang seharusnya dilakukan agar terhindar dari sifat individualisme :

1. Bersikap tidak egois tanpa memihak siapapun orangnya
Globalisasi memang membawa banyak pengaruh untuk kita, tapi untuk menghindari dari sikap individualisme seharusnya kita lebih ikhlas menolong seseorang tanpa memandang adanya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial menurut Soekanto (1998: 401) menjelaskan bahwa suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok⁹¹ sehingga seharusnya kita bisa lebih bersikap adil kepada siapapun yang membutuhkan.
2. Tidak merugikan orang lain dalam mencari keuntungan diri
Berusaha untuk menghargai dan menghormati orang lain dengan tidak merugikan orang lain demi diri kita sendiri, sifat

⁹¹ Hilmi Rahman, "Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, No. 55 (2018).

individualisme timbul karena adanya keegoisan dari individu sendiri.

3. Tidak mementingkan diri sendiri

Apabila kita dibutuhkan oleh oranglain janganlah bersifat acuh, mulailah untuk peduli dengan sekitar, hal seperti itu dibutuhkan dimana saja, sehingga apabila kita mengalami kesulitan pun mereka juga akan membantu.

4. Memahami perasaan orang lain.

Mencoba untuk menempatkan diri dengan posisi oranglain, contohnya apabila mereka kesusahan dan tidak ada yang membantu, hal seperti itulah yang harus dipikirkan apabila kita yang berada di posisi tersebut.

VI. INTOLERANSI DI BIDANG EKONOMI

Pengertian intoleransi ekonomi itu sendiri adalah suatu keadaan dan tindakan dimana diantara satu pihak dengan yang lainnya tidak mau bekerja sama ataupun salah satu pihak merugikan pihak yang lainnya serta memandang suatu pihak atas dasar suku, rasa tau agama (SARA) dalam lingkup perekonomian. Intoleransi dalam perekonomian Indonesia pun sering terjadi seperti kasus-kasus intoleransi di bidang-bidang lainnya. Intoleransi ekonomi tersebut mempunyai berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuk dari intoleransi ekonomi itu sendiri seperti adanya ketidakadilan ekonomi. Ada banyak sekali kasus ketidakadilan atau ketidaksetaraan ekonomi yang secara kelihatan ataupun yang tidak kelihatan secara langsung di depan kita. Ketidakadilan ekonomi, justru banyak yang diproduksi oleh negara maupun pemerintah itu sendiri yang dilaksanakan melalui aparatur-aparatur negara.

Sehingga ketidakadilan ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari intoleransi ekonomi dikarenakan pihak pemerintah hanya memberikan keadilan dalam segi perekonomian kepada pihak-pihak tertentu saja dan tidak kepada rakyat secara keseluruhan khususnya masyarakat kecil⁹². Tentunya intoleransi ekonomi juga berhubungan dengan masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) yaitu memandang suatu pihak maupun individu berdasarkan suku, agama maupun golongannya tetapi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) yang sering terjadi di dalam intoleransi ekonomi tentunya yang berhubungan dengan suatu golongan yaitu tidak adanya kerja sama diantara pihak karena memandang dan hanya mau menerima pihak lain berdasarkan golongan tertentu saja.

Salah satu contoh kasus ketidakadilan ekonomi di dalam masyarakat seperti pada kasus reklamasi teluk Jakarta yang jika dilihat dari kajian yang dilakukan oleh beberapa ahli tidak layak untuk diberlakukan. Tetapi justru negara memaksakan proyek reklamasi ini untuk terjadi atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan keuntungan perekonomian negara. Peran pemerintah dalam pembangunan reklamasi teluk Jakarta, sangat mempengaruhi berbagai pembangunan yang berkaitan dengan reklamasi. Melalui kebijakan pemerintah pembangunan tersebut dapat dikendalikan melalui pihak swasta. Kebijakan-kebijakan pemerintah sejak masa orde baru sampai masa reformasi masih belum terlaksana, penyebabnya pemerintah dengan berbagai aturannya, masih belum mampu meyakinkan masyarakat nelayan yang sangat ketergantungan terhadap sumber daya alam. Selain itu, isu

⁹² Eka Sastra, *Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*. (Expose, 2017).

kerusakan lingkungan semakin ramai diperdebatkan, karena isu tersebut berkaitan dengan keberlanjutan sumber daya dan apabila keberlanjutan sumber daya perairan laut terganggu dan mengalami kerusakan, maka yang akan mengalami kerugian semua orang termasuk pemerintah dan pihak swasta sehingga konflik nelayan kecil dan nelayan besar adalah soal perebutan akses sumber daya antara masyarakat lokal dan pebisnis dimana semua pihak memiliki kepentingan masing-masing. Para nelayan kecil mengakses laut hanya untuk kebutuhan sehari-hari mereka saja dan karena hal ini pulalah yang kemudian memicu terjadinya konflik antara kepentingan pebisnis dan nelayan dalam mengakses laut karena pihak-pihak tersebut memiliki perbedaan-perbedaan yang berbeda membuat konflik teluk Jakarta hingga saat ini masih dapat belum terselesaikan.⁹³

Hal ini mengindikasikan cerminan dari serangkaian panjang kepentingan ekonomi yang dimainkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan, konflik teluk Jakarta merupakan konflik akibat diadakannya reklamasi dimana sektor kelautan dan perikanan sering menimbulkan terjadinya konflik, sebagai konsekuensi laut sebagai sumber daya yang bersifat ruang terbuka yang mengakibatkan terbukanya ruang untuk perbedaan kepentingan⁹⁴. Keuntungan dari hasil reklamasi tersebut tentu hanya dapat dinikmati oleh para pelaku atau para petinggi usaha yang mengelola bisnis mereka di daerah reklamasi tersebut. Keuntungan ini tidak juga dirasakan oleh

⁹³ Prasetyo Soepono, "Analisis Shift-Share: perkembangan dan penerapan." *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)* 8, No. 1 (1993): 43-54.

⁹⁴ Eva Royandi, and Ricardus Keiya. "Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Wilayah Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2, No. 1 (2019): 77-98.

masyarakat sekitar yang tinggal di daerah kawasan reklamasi yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan kesenjangan ekonomi sehingga intoleransi ekonomi juga berhubungan dengan kesenjangan ekonomi. mengalami kerusakan, maka yang akan mengalami kerugian semua orang termasuk pemerintah dan pihak swasta. Kasus reklamasi ini juga tidak lepas dari arus informasi dimana kasus reklamasi ini menjadi sangat dikenal oleh masyarakat luas melalui informasi-informasi berita maupun dalam jejaring media sosial yang berisikan isu-isu mengenai kasus reklamasi ini. Kita bisa melihat, bahwa dengan adanya berita-berita kasus reklamasi ini menimbulkan polemik di masyarakat yang menyebabkan terjadi perbedaan pandangan dan pendapat sehingga menciptakan intoleransi kembali di dalam masyarakat. Dan juga kasus reklamasi teluk Jakarta ini tentunya juga termasuk kedalam masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) karena dalam hal ini pemerintah hanya memihak satu golongan tertentu saja yaitu para petinggi maupun pelaku usaha bukan kepada seluruh golongan yaitu seluruh masyarakat sehingga secara lebih khusus dapat dikatakan bahwa pihak yang berwenang hanya memihak dan hanya mau berinteraksi dengan salah satu golongan saja membuat terjadi adanya intoleransi antar golongan yang telah disebutkan sebelumnya.

Tetapi itulah contoh dari kasus intoleransi ekonomi yang terjadi secara umum yang biasanya terjadi yaitu melibatkan unsur antar golongan saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa intoleransi ekonomi terlebih khusus pada ketidakadilan ekonomi juga melibatkan unsur-unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) lainnya yaitu melibatkan unsur agama ataupun etnis seperti pada contoh kasus yang sangat sering terjadi yaitu antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Indonesia yang lain dimana para

kaum etnis Tionghoa dipandang dan dianggap sebagai kaum yang menguasai sebagian besar perekonomian negara Indonesia dan juga dianggap sebagai kaum yang “menjajah” ekonomi Indonesia. Tetapi dengan adanya intoleransi ekonomi seperti ini, tidak hanya intoleransi pada bidang ekonomi saja tetapi intoleransi ini telah menjurus juga kepada rasisme itu sendiri yaitu menyangkut kepada suku atau etnis orang lain.

Sebenarnya, tidak semua etnis Tionghoa secara keseluruhan mempunyai tingkat perekonomian yang tinggi maupun secara mapan. Perekonomian negara ini tidak hanya dipegang oleh metnis tionghoa saja tetapi juga dipegang dan dikuasai oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi karena adanya stigma di dalam sebagian besar masyarakat bahwa seluruh orang beretnis Tionghoa mempunyai tingkat perekonomian yang baik sehingga menyebabkan perasaan akan terancam pada sebagian besar masyarakat dan juga menyebabkan cepat timbulnya rasa kecemburuan atas kaum etnis tionghoa pada kalangan masyarakat awam. Tetapi sebenarnya, ancaman yang paling nyata bagi perekonomian negara Indonesia adalah masalah penetrasi perekonomian dari negara asing. Itulah ancaman yang seharusnya seluruh masyarakat Indonesia selesaikan bukan kepada ancaman akan etnis lainnya. Tetapi masyarakat awam yang secara pengetahuan kurang mengetahui dan paham bahwa ada masalah seperti itu sehingga mereka langsung melampiaskan kekesalan mereka hanya kepada etnis Tionghoa saja. Sehingga kita sebagai rakyat Indonesia seharusnya menghindari rasa intoleransi seperti itu dan bersatu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan jika disimpulkan bahwa permasalahan antara etnis Tionghoa yang ada di Indonesia dengan masyarakat Indonesia yang lainnya sebenarnya bukanlah masalah rasisme melainkan masalah kesenjangan ekonomi.

Tetapi harus digarisbawahi disini bahwa tidak semua masyarakat yang beretnis Tionghoa mempunyai tingkat perekonomian yang memadai. Tetapi harus juga dimaklumi bahwa memang sebagian besar masyarakat Tionghoa mempunyai sektor bisnis yang berkembang pesat. Sehingga dengan adanya keadaan dan situasi yang seperti ini, masyarakat Indonesia yang lainnya seharusnya menjadi lebih bersemangat lagi untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya sehingga dengan begitu juga akan adanya kesetaraan atas perekonomian dan usaha di dalam masyarakat Indonesia. Seperti pengakuan Bung Hatta terhadap warga negara Indonesia yang berketurunan Tionghoa. Bung Hatta mengakui bahwa mereka sangat dibutuhkan untuk masa-masa yang akan datang untuk membantu membangun pembangunan negara. Sehingga dengan adanya pengakuan seperti ini dapat menciptakan rasa kekeluargaan di dalam seluruh masyarakat Indonesia dalam berwirausaha maupun dalam berbisnis.

Sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat saling menguatkan bukannya menghina atau merendahkan satu dengan yang lainnya dan jika terciptanya keadaan yang seperti ini maka sentiment akan ras ataupun etnis pun akan hilang dari masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia dapat semakin rukun dan setiap masyarakatnya dapat selalu bekerja sama. Dan hubungannya dengan arus informasi yang semakin berkembang pesat setiap tahunnya adalah tentunya sebagian besar dari kita mengetahui bahwa ada banyak sekali hujatan-hujatan maupun konten-konten yang berisikan hal-hal yang menyudutkan suatu suku atau etnis tertentu terlebih khusus seperti topik ini yaitu kepada etnis Tionghoa dan tidak jarang hujatan-hujatan ini menyangkut perekonomian para masyarakat Indonesia yang beretnis Tionghoa. Hujatan-hujatan ini dapat banyak ditemui di dalam media sosial sehingga dapat menyebabkan intoleransi

diantara masyarakat menjadi lebih buruk lagi. Dengan adanya hujatan-hujatan seperti ini seluruh masyarakat diharuskan untuk tidak mudah terpancing dan bijak dalam memahami maupun melihat konten-konten yang berisikan hal-hal tersebut sehingga tidak terjadi aksi intoleransi di dalam masyarakat.

Bentuk intoleransi ekonomi yang lainnya adalah seperti korporatokrasi. Menurut Perkins, pengertian dari korporatokrasi itu sendiri adalah suatu sistem pemerintahan yang dikendalikan/dikuasai/dijalankan oleh beberapa korporat. Sehingga biasanya para korporat ini merupakan pengusaha-pengusaha tinggi yang mempunyai dana yang sangat besar untuk mengendalikan kebijakan-kebijakan seperti dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan bidang-bidang lainnya di dalam suatu negara. Berdasarkan pendapat Frans Magnis Suseno, "Ketidakadilan adalah akar semua sikap intoleran" yang berarti bahwa hak-hak ekonomi tidak berjalan dengan baik alias terjadi sebuah diskriminasi dan segregasi sosial-ekonomi terhadap pelaku ekonomi lemah misalnya, pasti sikap-sikap intoleran bakal menyeruak. Dengan demikian, sikap intoleran terjadi karena diproduksi oleh aparaturnegara karena telah bersikap tidak adil bagi bangsanya sendiri⁹⁵.

Dan sebagai landasan perekonomian untuk menyelesaikan permasalahan perekonomian ini yaitu intoleransi ekonomi agar dapat teratasi dan tidak terjadi maka haruslah sebaiknya diberlakukan sistem ekonomi pancasila yang dimana konsep sistem ekonomi ini pertama kali dikembangkan oleh Prof. Mubyarto. Sistem Ekonomi Pancasila ini digali berdasarkan pemikiran bahwa Sistem Ekonomi sangat terkait dengan ideologi, sistem nilai dan sosial-

⁹⁵ Hidayat, M, F, (2017), Politik Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jurnal Cahaya Keadilan, 5(1), 78.

budaya (kelembagaan) masyarakat di mana sistem itu dikembangkan. Prof. Mubyarto menyatakan dengan jelas bahwa ekonomi Pancasila merupakan Sistem Ekonomi yang khas (berjati-diri) Indonesia, yang digali dan dikembangkan berdasar kehidupan ekonomi riil (*real-life economy*) rakyat Indonesia. Ekonomi Pancasila berpijak pada kombinasi antara gagasan-gagasan normatif dan fakta-fakta empirik yang telah dirumuskan oleh founding fathers bangsa dalam wujud sila-sila dalam Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal (ekonomi) UUD 1945 (asli), yaitu pasal 27 (ayat 2), 31, 33, dan 34. Ekonomi Pancasila adalah Sistem Ekonomi yang mengacu pada sila-sila dalam Pancasila, yang terwujud dalam lima landasan ekonomi, yaitu ekonomi moralistik (ber-Ketuhanan), ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), dan diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara khusus, terdapat lima prinsip penerapan Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu: Pertama, roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kedua, ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Ketiga, semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. Keempat, demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan: koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Kelima, keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas,

bebas, dan bertanggung jawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia⁹⁶.

Meskipun dalam UUD 1945 Pasal 33 dan penjelasannya hanya singkat namun ideologi yang terkandung didalamnya jelas dan tegas, sehingga memenuhi syarat untuk disebut sebagai satu sistem ekonomi. Karena berangkat dari asas Pancasila khususnya untuk mewujudkan sila ke 5 (lima), yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka disepakati untuk menamai makna yang terkandung dalam Pasal 33 itu Sistem Ekonomi Pancasila (SEP)⁹⁷. Perintah atau amanah yang termuat dalam Pasal 33 berikut penjelasannya itu jelas dan tegas karena menegaskan hal-hal asas, apa yang dikuasai negara, dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-perorang. Karena itu proses atau mekanisme menuju tujuan yang ingin dicapai itu tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan tujuan utamanya yaitu kemakmuran rakyat. Artinya, sejak awal semua upaya-upaya atau proses untuk mewujudkan keadilan sosial sudah harus selaras, tidak dibelok-belokan atau ditunda-tunda dengan berbagai alasan, seperti yang kerap terjadi selama ini⁹⁸. Dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Pancasila adalah untuk mencapai kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak ada kata intoleransi di dalam masyarakat sehingga intoleransi itu sendiri dapat diatasi keberadaannya di dalam masyarakat.

⁹⁶ Haryo Aswicahyono, and David Christian. "Perjalanan Reformasi EKonomi Indonesia 1997-2016." *Centre for Strategic and International Studies* (2017); Mubyarto Mubyarto. "Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi." *Journal of Indonesian Economy and Business* 19, No. 1 (2004).

⁹⁷ Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*. (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018).

⁹⁸ Fuad Bawazier, "Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Keamanan Nasional* 3, No. 2 (2017): 233-252.

Tetapi sistem ekonomi Pancasila ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus didukung dengan penerapan paradigma ekonomi kerakyatan. Yang dimaksud dengan ekonomi rakyat adalah ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam konteks riil yang berkembang, istilah ekonomi rakyat muncul sebagai akibat ketidakpuasan terhadap perekonomian nasional yang bias kepada unit-unit usaha besar. Oleh karena itu, makna ekonomi rakyat lebih merujuk pada ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia yang umumnya masih tergolong ekonomi lemah, bercirikan subsistem (tradisional) dengan modal dan tenaga kerja keluarga serta teknologi sederhana.⁹⁹

Sehingga ekonomi kerakyatan itu sendiri adalah sistem ekonomi untuk mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan jadi ada keberpihakan pemerintah bagi seluruh masyarakat yang berupaya untuk menyusun aturan main ekonomi yang adil yang menempatkan ekonomi rakyat pada posisi yang sama derajatnya¹⁰⁰.

Dasar hukum dari intoleransi ekonomi ini sendiri dapat kita ambil seperti dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Diskriminasi Harga¹⁰¹ serta Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang

⁹⁹ Zainal Arifin Hosein, "Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945." *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* 23, No. 3 (2016): 503-528.

¹⁰⁰ Djakaria Machmud, "Pergulatan Pemikiran Paradigma Ekonomi Kerakyatan dalam Arus Globalisasi." *Hukum Responsif* 1, No. 1 (2016).

¹⁰¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Diskriminasi Harga

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah¹⁰². Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Diskriminasi Harga dapat disimpulkan bahwa adanya perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat dan adanya jaminan keamanan dan pelarangan atas praktik monopoli¹⁰³. Sedangkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini negara menjamin keberlangsungannya usaha kecil di masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan hal-hal seperti konglomerasi dan korporatokrasi. Dan tentu dasar hukum yang paling utama dan yang paling dasar adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang ada pada Ayat (1) dan Ayat (4)¹⁰⁴ yaitu pada ayat yang pertama yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" dan pada ayat yang keempat yang berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Pada ayat yang pertama dijelaskan bahwa perekonomian nasional adalah hasil usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan sehingga perekonomian negara Indonesia tidak hanya merupakan hasil usaha

¹⁰² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

¹⁰³ Irwan Sugiarto, "Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga." *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, No. 2 (2016): 153-174.

¹⁰⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4)

dari segelintir golongan ataupun etnis tertentu saja melainkan hasil usaha dari seluruh rakyat Indonesia. Dan pada ayat yang keempat dijelaskan bahwa perekonomian nasional dilakukan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang perlu ditekankan pada ayat ini adalah prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dimana pada prinsip kebersamaan perekonomian negara Indonesia dijalankan secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia, pada efisiensi berkeadilan perekonomian Indonesia merupakan perekonomian yang berkeadilan yaitu adil bagi seluruh rakyat Indonesia, dan yang terakhir pada keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berarti bahwa hasil kemajuan dari perekonomian negara Indonesia adalah untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dari ketiga prinsip ini dapat disimpulkan bahwa negara menjamin adanya perekonomian nasional yang merupakan hasil bersama dari seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan dan berkemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak ada perbedaan di dalam masyarakat. Pemikiran, ide, dan gagasan yang mendasari pembentukan Pasal 33 UUD 1945, antara lain: pertama, adanya kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan sebagai usaha nyata mewujudkan keadilan sosial; kedua, konsep "Kesejahteraan Sosial" yang dimaksudkan agar negara memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerintahan kepada seluruh rakyat; ketiga, adanya komitmen para penyusun UUD 1945 untuk percaya terhadap cita-cita keadilan

sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata¹⁰⁵.

Salah satu penyebab menjadi maraknya intoleransi ekonomi ini tentunya adalah arus informasi yang berisikan informasi-informasi yang belum tentu benar dan akurat. Sehingga salah satu tindakan yang dapat mencegah agar intoleransi ekonomi tidak terjadi lagi adalah dengan menciptakan arus informasi baik itu berita atau media massa maupun konten-konten di dalam media sosial yang lebih akurat dan dapat diuji kebenaran dan validitasnya. Tetapi peranan pers sangatlah penting dalam permasalahan seperti ini. Di saat terjadi konflik, pers seharusnya memberikan informasi yang seimbang, sehat, serta menenangkan suasana dan bukannya malah memanas-manas atau memprovokasi publik untuk ikut memperuncing sebuah konflik. Idealnya, pers atau media seharusnya menyediakan informasi yang jujur, jernih dan seluas mungkin mengenai apa yang layak dan perlu diketahui oleh masyarakat sehingga dapat membantu meredakan dan menyelesaikan konflik¹⁰⁶.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat bawah agar tidak terjadi intoleransi ekonomi dan setiap masyarakat mempunyai posisi yang sama dalam bidang perekonomian maka harus dilakukan suatu transformasi ekonomi bagi masyarakat yaitu perubahan ekonomi kedalam ekonomi digital sehingga dengan penggunaan ekonomi digital ini dapat

¹⁰⁵ Taufiqurrohman Syahuri, "Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9, No. 2 (2016): 243-258.

¹⁰⁶ Bend Abidin Santosa, "Peran media massa dalam mencegah konflik." *Jurnal Aspikom* 3, No. 2 (2017): 199-214.

meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat dan juga negara¹⁰⁷. Penggunaan sosial media sebagai sarana untuk ekonomi digital adalah suatu hal yang wajib untuk diketahui. Media promosi yang dulu dirasa mahal karena harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, sekarang sudah lebih efektif dan murah dan bisa dirasakan oleh semua pelaku bisnis, termasuk pengusaha ekonomi kreatif, media sosial sebagai terobosan modern media promosi yang murah dan dalam ikut serta ikut andil dalam berkembangnya ekonomi era digital seperti sekarang ini.

Tentu intoleransi ekonomi ini melanggar sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan sila kelima dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada sila kedua, intoleransi ekonomi merupakan sebuah pelanggaran karena dalam intoleransi ekonomi tidak adanya rasa kemanusiaan yang dapat berupa rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam menjalankan suatu perekonomian bersama diantara masyarakat. Dan pada sila kelima, intoleransi ekonomi juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran karena seperti contoh kasus reklamasi sebelumnya, pemerintah tidak bertindak adil dalam meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat dan hanya kepada golongan tertentu saja. Sehingga kedua sila dari Pancasila ini harus menjadi pedoman dalam bertoleransi antar sesama masyarakat terlebih khusus dalam hubungan ekonomi yaitu pada sila kedua, seluruh masyarakat harus mempunyai rasa kemanusiaan yaitu rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam membangun perekonomian negara dan pada sila kelima, seluruh masyarakat dan pemerintah harus bertindak adil

¹⁰⁷ Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

dan tidak membeda-bedakan dan tidak berpandangan atas SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan).

VII. PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN MENGHADAPI INTOLERANSI POLITIK DI INDONESIA DALAM ARUS GLOBALISASI

Intoleransi adalah yaitu sikap kurang menghargai perbedaan manusia baik secara SARA dan politik selain itu sikap ini juga sikap tidak saling menghargai, membenci, tidak saling menghargai dan tidak mau mengalah Indonesia telah terjadi Intoleransi baik secara SARA dan politik dan intoleransi ini sangat rentan perpecahan Politik adalah proses pembentukan dalam kekuasaan.

Globalisasi berasal dari kata Globalization, global yang artinya dunia sedangkan lization yang artinya proses secara arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia suatu proses yang membuat manusia saling terbuka satu sama lain dan bergantung satu sama lain tanpa batas waktu dan Tidak ada bisa dipungkiri globalisasi mempengaruhi dunia baik dari segi Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan, Politik baru – baru ini Indonesia sempat diguncang intoleransi politik antar kubu saling menyalahkan dan menganggap kubunya adalah paling benar.

Contoh kasus: JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir memaparkan intoleransi politik di Indonesia diperkirakan semakin menguat jelang Pemilu 2019. Amin berkaca pada temuan survei LIPI yang dirilis beberapa waktu lalu terhadap 1800 responden di provinsi-provinsi Indonesia. "Poin yang bisa saya sampaikan bahwa kami menemukan fakta bahwa ada gejala yang sangat kuat meningkatnya intoleransi politik ya. Meskipun kemudian pada level sosial masih toleransi,"

kata Amin dalam diskusi Mekanika Elektoral dalam Arus Politik Identitas di PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (7/12/2018) sore. Artinya, kata Amin, penerimaan kelompok masyarakat terhadap kelompok yang berbeda dalam konteks sosial masih cukup baik. Namun, penerimaan terhadap pilihan politik yang berbeda cenderung rendah. Baca juga: Gempa Intoleransi Mengancam Indonesia "Contoh, misalkan 57,8 persen responden mengatakan bahwa kami hanya akan memilih pemimpin yang seagama. Ini mulai dari (pemimpin) level RT sampai Presiden. Kita simulasikan apakah karena kinerja atau apa, tapi bukan, ternyata agama," kata dia. Menurut Amin, hal itu berimplikasi terhadap potensi individu atau suatu kelompok berupaya mencegah individu atau kelompok lain untuk mengambil pilihan calon pemimpin yang berbeda. "Jadi kami kemudian berdiskusi bahwa apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta berapa orang menolak, misalkan, menyalatkan (jenazah) orang yang berbeda pilihan politik adalah dampak dari itu," kata dia. Jadi bukan sekadar secara pasif mereka memilih hanya seagama tapi secara aktif mereka mencegah orang lain memilih pemimpin yang berbeda. Jadi itu masalahnya," lanjut Amin. Tiga faktor Amin menyebutkan ada tiga faktor yang mendorong intoleransi politik menjadi tinggi saat ini. Pertama, adanya perasaan terancam dan tidak percaya terhadap pihak lain yang berbeda. "*Distrust* itu tinggi sekali. Dari data kami misalkan 18,4 persen responden itu percaya bahwa agama lain itu mendominasi kehidupan publik. Kedua, tingginya fanatisme keagamaan yang berbanding terbalik dengan rendahnya sekularitas," katanya. Baca juga: Meredam Intoleransi dengan Semangat Sumpah Pemuda Faktor ketiga, papar Amin, penggunaan media sosial. Menurut dia, media sosial semakin mendorong perasaan terancam, tidak percaya serta fanatisme keyakinan. Amin mencontohkan sebagian responden yang mempercayai isu kebangkitan Partai

Komunis Indonesia (PKI) yang dibicarakan di media sosial. "Dari sekian responden menyatakan 54,1 persen menyatakan pernah mendengar berita kebangkitan PKI di medsos. Dan dari sekian banyak itu 42,8 persen setuju dengan isu tersebut," kata dia.

Dalam kendali organisasi menurut Lips, posisi perempuan lebih mengkhawatirkan daripada laki-laki, sehingga dalam pola relasi gender masih seringkali terjadi ketimpangan. negara perempuan. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah perempuan Indonesia adalah 118.010.413 jiwa atau sekitar 49% dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 237.641.326 jiwa.

Artinya, kondisi ideal keterwakilan perempuan Indonesia dalam lembaga perwakilan atau legislatif seharusnya mencapai rasio yang sama dengan jumlah penduduk Indonesia berjenis kelamin perempuan. Namun, 12 kali hasil pemilu memperlihatkan untuk mencapai angka kritis (*critical numbers*) 30% keterwakilan perempuan sebagaimana ditetapkan sebagai tindakan khusus sementara bukanlah pekerjaan yang mudah dan sangat membutuhkan dukungan dari banyak pihak, baik pemerintah, lembaga non pemerintah (partai politik, lembaga swadaya masyarakat) dan akademisi.

Bahwa Politik adalah macam – macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan – tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan – tujuan itu.¹⁰⁸ Politik Nasional adalah asas, haluan , usaha , kebijaksanaan dari negara di dalam kerangka mencapai tujuan nasionalnya dengan memanfaatkan secara optimal seluruh potensi nasionalnya.

¹⁰⁸ Arbi Sanit. *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: CV Rajawali, 1981).

Ketidakstabilan Indonesia berasal dari belum melembaganya struktur dan prosedur politik yang mampu memberi tempat kepada masyarakat luas untuk mengambil bagian di dalam proses politik, secara teoritis stabilitas politik banyak ditentukan oleh 3 variabel yaitu perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan perlembagaan baik maupun struktur proses politik dan partisipasi di politik secara menyeluruh dalam sejarah politik Indonesia dan ketiga variabel pengukur kestabilan politik dapat diamati. Namun pengamatan terperinci jika dimensi waktu diperhatikan. Kesan yang mendalam dalam sistem politik Indonesia. Peran elit yang terlalu dominan membuat masyarakat tidak berdaya untuk membangun dirinya dan terlibat dalam menciptakan sistem politik yang stabil, malah sebaliknya timbul beberapa persoalan yang tidak terselesaikan.

Masyarakat atau rakyat merupakan penentu berjalannya suatu sistem politik, karena masyarakat dianggap sebagai subjek dan objek dari sistem politik yang ada. Kedudukan partai politik menjadi sangat strategis pada saat Indonesia memasuki babak baru dalam sistem politik yang lebih terbuka. Partai politik dan elit politik tidak hanya tergantung pada kekuatan yang berada di luar kerangka sistem politik. Persoalannya sekarang adalah partai politik dan elit politik belum memiliki kemampuan untuk mempercayai dirinya sendiri dalam menentukan sikap, termasuk sangat tergantung pada *backing* seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Kemandirian partai politik dan kaum elit politik sangat dibutuhkan agar tidak memiliki rasa ketergantungan kepada pemerintah, termasuk dalam menentukan sikap politik untuk melakukan oposisi atau koalisi. Keberanian partai politik untuk menentukan sikap sangat diperlukan untuk menjaga kontaminasi kepentingan rezim yang berkuasa dengan kepentingan rakyat. Pengawasan dan pengendalian

kekuasaan oleh oposisi menunjukkan berjalannya *check and balances system* dalam sistem politik. Jika ini tidak terjadi dikhawatirkan kegiatan extra parlementer untuk melakukan tekanan terhadap pemerintah akan semakin marak.

Reformasi yang diharapkan oleh golongan mahasiswa dan masyarakat akan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, para pemegang kekuasaan harus berupaya mengontrol proses demokrasi yang sedang berjalan. Pertimbangan tersebut, dengan berbagai alasannya, tidak untuk membenarkan segala tindakan pemerintah (penguasa) hanya untuk mempertahankan kekuasaan, baik berupa alasan ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan demokrasi, stabilitas politik dengan melakukan penyederhanaan partai politik, maupun melakukan eliminasi peran Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, tidaklah dapat dibenarkan jika pemegang kekuasaan semata-mata berorientasi untuk mempertahankan kekuasaan, terutama jika ditempuh melalui cara-cara yang kurang simpatik dan merugikan kepentingan rakyat. Pada era demokrasi, terdapat peran-peran lembaga lain yang merasa dirugikan akibat dibatasinya kewenangan untuk melakukan berbagai kegiatan politik, terutama aktivitas militer yang dirugikan melalui pembatasan ruang.¹⁰⁹

Tidak heran jika beberapa elit politik memberikan porsi-porsi tertentu kepada militer untuk menduduki tempat-tempat yang dianggap sangat strategis dari sisi politik dan ekonomi. Tindakan seperti itu dilakukan semata-mata untuk mewujudkan demokrasi semu, bukan demokrasi yang ideal sebagaimana yang dicita-citakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan Presidensial, dimana adanya

¹⁰⁹ *Ibid* hlm 425.

pemisahan kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang berdasarkan prinsip “checks and balances”, ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga Negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui dan membahas berbagai teori dan praktek berdasarkan UUD 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia Selama lebih dari 30 tahun sebelum adanya reformasi tahun 1998, sejarah mencatat bahwa konfigurasi politik yang dibangun secara tidak demokratis telah menjadikan hukum terpukul.¹¹⁰

Jika keadaan ingin berubah, dalam arti produk hukum benar-benar bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat, konfigurasi politik harus diubah dari otoriter ke demokrasi. Ide negara demokrasi bukanlah hal yang baru bagi Indonesia karena sejak negara ini berdiri, ide utama yang diajukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pola hubungan pemerintah-rakyat sudah didasarkan pada konsep demokrasi. Namun demokrasi yang dimaksud ialah sebuah model demokrasi yang bukan liberal, melainkan terikat dengan nilai bangsa.

VIII. GLOBALISASI & PENGARUHNYA PADA FENOMENA INTOLERANSI

Globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya keruang lingkup dunia. Banyak kalangan menyadari bahwa globalisasi banyak membawa dampak positif, diantaranya komunikasi

¹¹⁰ *Ibid* hlm. 426.

lebih canggih, Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Contoh sederhana bisa kita lihat dari teknologi internet, parabola dan TV, orang di belahan bumi manapun akan dapat mengakses berita dari belahan dunia yang lain. secara cepat. Hal ini akan terjadi interaksi antarmasyarakat dunia secara luas, yang akhirnya akan saling mempengaruhi satu sama lain, terutama pada kebudayaan daerah, seperti kebudayaan gotong royong, menjenguk tetangga sakit dan lain-lain akan luntur. Globalisasi juga berpengaruh terhadap pemuda dalam kehidupan.

Di zaman Globalisasi saat ini banyak pengaruh yang mempengaruhi remaja. Ada pengaruh yang positif ada juga pengaruh yang negatif. Sebagai remaja yang baik kita harus memanfaatkan alat - alat / teknologi yang sudah canggih sehingga mampu menguasainya. Indonesia adalah negara yang masyarakatnya mempunyai etika yang baik. Tapi saat ini banyak sekali remaja yang tidak sopan, tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Mungkin itu adalah pengaruh negatif dari Globalisasi.

Etika seharusnya diajarkan sejak dini oleh orang tuanya. Anak biasanya menirukan kegiatan orang tuanya, maka dari itu orang tua seharusnya melakukan kegiatan yang mampu memberikan arti etika baik. Dan mampu dimengerti oleh si anak. Dengan didikan yang baik anak tersebut akan menjadi anak yang sopan kelak. Dan anak tersebut juga harus mempunyai iman yang kuat. Sehingga, mampu melawan pengaruh buruk Globalisasi.

IX. KESIMPULAN

Indonesia yang merupakan negara multikultural dan kaya akan keberagaman. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib untuk saling menghormati dan menghargai semua perbedaan yang ada. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara agama satu dengan agama yang lain, dengan suku yang satu dan suku yang lain. Keberagaman tersebut dapat memicu timbulnya konflik apabila di dalam masyarakat tidak terdapat nilai-nilai toleransi seperti yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila kita sebagai pedoman hidup bangsa. Dalam arus informasi di era globalisasi seperti sekarang ini, kita harus selalu waspada dan jangan mudah untuk terprovokasi oleh berita-berita yang memicu perpecahan, kita harus bisa menyaring informasi yang beredar melalui media dengan bijak dan tepat dan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.

ACKNOWLEDGMENTS

None.

COMPETING INTERESTS

The Authors declared that they have no competing interests.

REFERENSI

- Agus Fauzi, "Agama, Pancasila dan Konflik Sosial di Indonesia." *Lentera Hukum* 4, No. 2 (2017): 122-130.
- Agustinus Sugeng Priyatno, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. (Semarang: UNNES PRESS, 2018).

- A. Sudarsono, *Buku Pengantar Sosiologi*. (Yogyakarta: UNY PRESS, 2016).
- Ainun Mardia Harahap, "Konsep dan Strategi Pendidikan Karakter di Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum 2013." *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 4, No. 1 (2016).
- Ainun Mardia Harahap, "Konsep dan Strategi Pendidikan Karakter di Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum 2013." *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 4, No. 1 (2016).
- Anas Saidi, "Relasi Pancasila, Agama dan Kebudayaan: Sebuah Refleksi." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 11, No. 1 (2009): 25-50.
- Arbi Sanit. *Sistem Politik Indonesia*. (Jakarta: CV Rajawali, 1981).
- BBC Indonesia, *Online* <<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39076611>>
- Bend Abidin Santosa, "Peran media massa dalam mencegah konflik." *Jurnal Aspikom* 3, No. 2 (2017): 199-214.
- D. A. Sobur, *Buku Psikologi Umum*. (Pustaka Setia, 2016).
- Dhanang Respati Puguh, "Melestarikan dan mengembangkan warisan budaya: kebijakan budaya semarangan dalam perspektif sejarah." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 2, No. 1 (2017): 48-60.
- Dicky Hastjarjo, "Mengembangkan pemikiran kritis mahasiswa." *Buletin Psikologi* VII, No. 1 (1999).
- Djakaria Machmud, "Pergulatan Pemikiran Paradigma Ekonomi Kerakyatan dalam Arus Globalisasi." *Hukum Responsif* 1, No. 1 (2016).
- Eka Sastra, *Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*. (Expose, 2017).
- Eko Digdoyo, "Kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab sosial media." *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)* 3, No. 1 (2018): 42-59.
- Eva Royandi, and Ricardus Keiya. "Kontestasi Aktor dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Wilayah Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2, No. 1 (2019): 77-98.

- Fuad Bawazier, "Sistem Ekonomi Pancasila: Memaknai Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Keamanan Nasional* 3, No. 2 (2017): 233-252.
- Gina Lestari, "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28, No. 1 (2015).
- Greg Genep Sukendro, *Pancasila Riwayatmu Kini* (Jakarta: Tifa dan Grafisocial, 2012).
- Haryo Aswicahyono, and David Christian. "Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016." *Centre for Strategic and International Studies* (2017).
- Hildgardis MI. Nahak, "Upaya melestarikan budaya indonesia di era globalisasi." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 5, No. 1 (2019): 65-76.
- Hilmi Rahman, "Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan." *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, No. 55 (2018).
- I Gusti Ayu Rachmi Handayani. "Pancasila Sumber Nilai Keberagaman Beragama Bangsa Indonesia". *Jurnal Seminar Nasional Hukum* 3, No. 1 (2016).
- Imam Tholkhah, "Potensi Intoleransi Keagamaan Siswa Sekolah di Jawa dan Sulawesi." *Edukasi* 11, No. 1 (2013): 294716.
- Indra Wicaksono, "Membumikan Pancasila Arti Penting Menegakkan HAM Sebagai Tameng Toleransi Keberagaman." *Lex Scientia Law Review* 2, No. 2 (2018): 169-176.
- Irwan Sugiarto, "Perspektif Ilmu Ekonomi Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Diskriminasi Harga." *Jurnal Wawasan Yuridika* 33, No. 2 (2016): 153-174.
- M. Abdul Khaliq Hasan, "Merajut Kerukunan dalam Keragaman Agama di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran)." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, No. 1 (2016): 66-77.
- M. Insyah Musa, "Dampak pengaruh globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia." *Jurnal Pesona Dasar* 3, No. 3 (2015).
- Meilanny Budiarti Santoso, "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang

- Dibangunnya." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (2017): 104-109.
- Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Mohammad Mulyadi, "Membangun NKRI dengan multikulturalisme." *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* 9, No. 10 (2017): 9-12.
- Mubyarto Mubyarto. "Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi." *Journal of Indonesian Economy and Business* 19, No. 1 (2004).
- Musa Asy'ari, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Lesfi, 1992).
- Natal Kristiono, "Penguatan Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang." *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN* 2, No. 2 (2017): 193-204.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2013).
- Prasetyo Soepono, "Analisis Shift-Share: perkembangan dan penerapan." *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)* 8, No. 1 (1993): 43-54.
- Ramdhan Witarsa, et al. "Pengaruh penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial siswa sekolah dasar." *Pedagogik (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)* 6, No. 1 (2018): 9-20.
- Shofiyatul Azmi, "Pendidikan Kewarganegaraan Merupakan Salah Satu Pengejawantahan Dimensi Manusia Sebagai Makhluk Individu, Sosial, Susila, dan Makhluk Religi." *Likhitaprajna* 18, No. 1 (2016): 77-86.
- Siti Wulan Agustinah, and Dina Indriyani. "Dampak Globalisasi Terhadap Perilaku Belajar Siswa di SMK Negeri 1 Cianjur." *Integralistik* 30, No. 1 (2019).
- Soedarsono Soemarno, *Ketahanan Pribadi dan Ketahanan Keluarga sebagai Tumpuan Ketahanan Nasional* (Jakarta: PT Intermedia, 1997).

- Sri Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia: Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi, dan Kebijakan di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Stev Koresy Rumagit, "Kekerasan dan diskriminasi antar umat beragama di Indonesia." *Lex Administratum* 1, No. 2 (2013).
- Syarbaini Syahrial, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015).
- Tarli Nugroho, *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*. (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018).
- Taufiqurrohman Syahuri, "Politik Hukum Perekonomian Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9, No. 2 (2016): 243-258.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Diskriminasi Harga
- Widyastuti, Retno. "Strategi Pendidikan Karakter dalam Mengantisipasi Paham Radikal dan Intoleran di Sekolah." *Wawasan: Jurnal Kediklatan Balai Diklat Keagamaan Jakarta* 2, No. 2 (2021): 187-201.
- Zainal Arifin Hosein, "Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945." *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* 23, No. 3 (2016): 503-528.
- Zuly Qodir, "Kaum muda, intoleransi, dan radikalisme agama." *Jurnal Studi Pemuda* 5, No. 1 (2016): 429-445.